

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tentang Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat dapat dikatakan telah menjadi bagian dari sebuah isu yang banyak terjadi pada berbagai negara, kondisi ini dipicu oleh isu yang berkaitan dengan laju tingkat pertumbuhan penduduk serta pasar uang yang mengalami perkembangan sangat pesat, sementara disatu sisi tingkat Literasi Keuangan Masyarakat terindikasi masih rendah sehingga dikhawatirkan dengan kondisi demikian akan berdampak negatif terhadap keputusan keuangan masyarakat.

Terhadap tingkat perkembangan Literasi Keuangan yang ada dimasyarakat, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemantauan sejak Tahun 2013, adapun perkembangan Tingkat Literasi Keuangan di Indonesia berdasarkan hasil survey terakhir OJK di Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat di
Indonesia Tahun 2013-2022

Tahun	Lokasi (Kab/Kota)	Respon den	Literasi Keuangan		Literasi Keuangan Syariah	
			Literasi	Inklusi	Literasi	Inklusi
2013	64	6.400	21,84%	59,74%	-	-
2016	64	9.680	29,66%	67,82%	8,11%	11,06%
2019	67	12.773	38,03%	76,19%	8,93%	9,10%
2022	76	14.634	49,68%	85,10%	9,14%	12,12%

Sumber : Siaran Pers SNLIK OJK 2013-2022

Perkembangan Tingkat Literasi Keuangan dari Masyarakat saat ini dapat dilihat dalam rentang waktu Sepuluh Tahun sejak dilakukan Survey Pertama di Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 28.16% dan jika dirata-ratakan setiap tahunnya Tingkat Literasi Keuangan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 2.8%, demikian pula terhadap Inklusi Keuangan yang menunjukkan peningkatan cukup besar yakni telah mencapai angka 85,10% atau dapat diartikan bahwa diantara 100 orang penduduk 85 orang diantaranya telah memiliki akses terhadap berbagai lembaga keuangan atau perbankan.

Survey yang dilakukan oleh OJK tersebut selain mengkaji tentang permasalahan Literasi Keuangan secara menyeluruh, juga diberikan gambaran tentang tingkat Literasi Keuangan Syariah (*Islamic Financial*) masyarakat yang juga menunjukkan trend peningkatan dari 8,11% menjadi 9,14%, artinya dalam rentang waktu 6 (Enam) Tahun tingkat pemahaman masyarakat tentang Keuangan berbasis Syariah juga semakin meningkat. Hanya saja untuk Inklusi Keuangan dapat dilihat pada hasil Survey Tahun 2016 mengalami penurunan.

Penurunan yang terjadi pada Tahun 2016 tersebut dikarenakan adanya beberapa bentuk perbaikan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah terhadap pelayanan kepada masyarakat, salah satunya yakni menyatukan semua lembaga perbankan BUMN berbasis syariah dalam wadah Bank Syariah

Indonesia (BSI) dan dampaknya terlihat pada Tahun 2022 dimana Inklusi Keuangan dari Lembaga Perbankan Syariah kembali mengalami peningkatan menjadi 12.12%.

Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) jika dilihat dari segi pengertiannya menurut pandangan dari Kusuma Ningtuti (2020) dapat dimaknai sebagai sebuah kombinasi kebutuhan akan kesadaran, pengetahuan, keahlian, etika, dan sikap dalam membuat keputusan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan individu. Demikian pula jika dikaitkan dengan Keuangan Berbasis Syariah maka menurut Mifta Novianti Putri, (2022) bahwa Literasi Keuangan Berbasis Syariah (*Islamic Financial Literacy*) yakni kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan keuangan, sikap, dan ketrampilan untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana selama ini ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan dan perbankan berbasis syariah.

Sedangkan Inklusi Keuangan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dapat diartikan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, lancar, tepat waktu dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap individu. Sehingga jika dihubungkan dengan keuangan syariah menurut Nasir, dkk (2022) dapat diartikan adanya ketersediaan dan kemudahan

akses bagi seluruh golongan masyarakat untuk dapat menjangkau layanan lembaga jasa keuangan sesuai aturan dan hukum syariah, atau dengan kata lain teraksesnya produk dan jasa keuangan Berakad Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi hasil Survey yang dilakukan pada Tahun 2022, melihat bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat secara umum dapat dikatakan telah mengalami peningkatan yang sangat baik, hanya saja untuk Literasi keuangan serta Inklusi Keuangan berbasis syariah dianggap masih sangatlah rendah. Kondisi inilah yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi literasi dan keuangan syariah agar nantinya Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dengan menerbitkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 dengan mengambil tema “Bank Syariah yang Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera” (OJK, 2023)

Diluncurkannya Road Map tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, dimana salah satunya dengan melihat bahwa tingkat Penyaluran Pembiayaan yang dikeluarkan masih berkisar 18,6%, yang artinya Kinerja dari berbagai Lembaga Perbankan Syariah belum mampu memenuhi standard yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yakni 20% dari seluruh Total Pembiayaan yang disalurkan oleh semua

jenis lembaga perbankan di Indonesia. Walaupun secara Trend dan juga jika dilihat dari Market Share dari Pengelolaan Pembiayaan dari Lembaga Perbankan Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya dalam mendukung pembiayaan terhadap UMKM.

OJK Institute (2023) mengemukakan bahwa penyebab masih rendahnya Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah di Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain : Pemahaman masyarakat masih rendah kendati *Awareness* (Kesadaran) terhadap Keuangan Syariah dapat dikatakan cukup tinggi, Masyarakat masih diperhadapkan pada pilihan antara Perbankan Syariah dan Bank Konvensional, Kompetensi sumber daya insani yang masih harus ditingkatkan, dan produk dan layanan, pemanfaatan teknologi belum optimal, serta aspek regulasi dan permodalan yang belum mendukung

Peluang terhadap Pengembangan dari Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia, secara umum sangatlah besar sebab didukung oleh Kondisi Sosial dimana Masyarakat di Indonesia adalah Mayoritas Muslim, ditambah lagi sasaran utama pembiayaan yang telah ditetapkan dalam *plan business* Lembaga Perbankan Syariah yakni berorientasi pada peningkatan kinerja UMKM, sehingga langkah kongkrit yang semestinya dilakukan saat ini menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK adalah merubah paradigma agar tidak hanya mengutamakan penambahan keuntungan bagi pemegang

saham, tapi juga meningkatkan nilai sosial, yang dapat dirasakan nasabah, masyarakat, dan lingkungan (Antara, 2023)

Pernyataan ini pada dasarnya sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Nahla Zamharira (2021) bahwa untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah tentunya tidak terlepas dari peran pelaku-pelaku dari Lembaga Keuangan Berbasis Syariah, hal ini dapat dilihat bahwa minat dari masyarakat untuk mengenal dan menggunakan Lembaga Perbankan Syariah semakin meningkat, kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan Market Share dari Tahun 2019 ke 2020 mengalami pertumbuhan 0,2%, dan Tahun 2023 berdasarkan data dari OJK Pembiayaan yang disalurkan mencapai angka Rp.564,37 atau lebih besar dibanding penyaluran pembiayaan pada Tahun 2022 yakni sebesar Rp.470 triliun, dimana untuk pembiayaan ini tercatat untuk tujuan modal kerja dan investasi UMKM masing-masing tumbuh sebesar 4,85% dan 8,15% per tahun.

Walaupun tingkat pertumbuhannya tidak signifikan akan tetapi hal ini menggambarkan bahwa masyarakat secara perlahan mulai mengenal tentang Lembaga Perbankan Syariah, hanya saja permasalahan yang dihadapi saat ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan (2021) bahwa sampai pada akhir Tahun 2020 perkembangan tingkat penyaluran investasi dari Perbankan Syariah kepada UMKM masih tergolong rendah, berkisar 18.62% atau

berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni 20% dari Total Pembiayaan seluruh Lembaga Perbankan.

Rendahnya jumlah penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Perbankan Syariah terhadap peningkatan kinerja UMKM tersebut menurut Agista Berliana (2023) karena diperhadapkan pada permasalahan masih terbatasnya akses terhadap produk pembiayaan pada Perbankan Syariah kemudian hal ini diperparah dengan masih rendahnya kemampuan Literasi dan Inklusi Keuangan khususnya terkait pengelolaan keuangan berbasis Syariah (*Islamic Financial Literacy*) dikalangan pelaku UMKM.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Tulus Tambunan (2021) bahwa UMKM yang sering diartikan dengan unit usaha produktif sifatnya berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha pada berbagai sektor ekonomi, secara umum juga memiliki problematika yang sama di hampir semua daerah yakni keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas SDM, terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang keuangan.

Problematika inilah yang sering menjadi penghambat terhadap peningkatan Kinerja dari UMKM, dimana menurut pandangan dari Ariyani, R (2020) bahwa Kinerja UMKM dapat diukur dari segi keuangan yang didasarkan pada hasil tindakan yang telah dilakukan dimasa lalu, dan non keuangan yang ditinjau dari sisi kepuasan

pembeli, produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis/ intern serta komitmen personel/pengelola yang akan menentukan kinerja keuangan dimasa yang akan datang.

Pemerintah Desa Cemba melalui BUMDes sejak Tahun 2020 telah membentuk satu wadah yang khusus memberikan dukungan terhadap Pengembangan UMKM. Wadah yang diberi nama “Suluh Kreatif” ini dijadikan sebagai sarana untuk memberikan pinjaman lunak kepada seluruh UMKM di Desa Cemba Pasca Covid 19. Seiring perkembangannya dari hasil pemantauan Pengelola “Suluh Kreatif” melihat bahwa UMKM yang dibina dapat dikatakan mulai berkembang dan beberapa masukan dari para Pelaku UMKM saat ini mereka membutuhkan tambahan Modal Usaha.

Menyikapi keinginan dari para pelaku UMKM tersebut, pihak Pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan dukungan sumber permodalan, sebab untuk menggunakan Anggaran Desa, pihak Pemerintah Desa dibatasi oleh regulasi yang ada. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan yakni memfasilitasi berbagai lembaga perbankan melakukan sosialisasi tentang produk mereka ke masyarakat termasuk Lembaga Perbankan Syariah.

Mencermati kondisi masyarakat desa Cemba yang nilai religiusitasnya masih bersifat feodal, maka pihak Pemerintah Desa berupaya mengarahkan masyarakat untuk menggunakan produk Perbankan Syariah. Mendukung pernyataan tersebut Ahmad Fauzi

(2020) juga menyatakan bahwa pendekatan secara religius memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat terhadap penggunaan fasilitas pada Lembaga Keuangan Berbasis Syariah.

Fenomena yang terlihat bahwa peran dari perbankan syariah sebagai lembaga yang diharapkan mampu untuk dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah serta mendukung Kinerja UMKM, masih sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya keterlibatan UMKM dalam menggunakan semua bentuk fasilitas dan produk dari perbankan syariah. Sehingga mendukung pengaruh dari nilai religiusitas yang ada dimasyarakat maka semestinya pihak Lembaga Perbankan perlu memberikan edukasi terhadap masyarakat dan juga pelaku UMKM, khususnya tentang produk yang dimiliki agar kemampuan Literasi dan Inklusi Keuangan mereka menjadi lebih baik.

Peluang lainnya yang juga semestinya mampu dimanfaatkan oleh pihak lembaga perbankan syariah termasuk di Desa Cemba yakni meningkatnya minat mereka untuk menggunakan produk pada lembaga perbankan syariah. Hal ini juga diungkapkan oleh Mifta Novianti Putri (2022) bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menunjukkan trend positif.

Yadi A, dkk (2023) juga menguraikan bahwa perlunya edukasi tentang Literasi dan Inklusi Keuangan kepada masyarakat agar dapat

menghindarkan mereka dari berbagai bentuk Modus Investasi Bodong terutama melalui media online dengan iming-iming keuntungan dan kemudahan, namun pada kenyataannya justru tidak sedikit dari pelaku usaha atau masyarakat yang dijadikan sebagai korban melalui model investasi bodong tersebut, sehingga dengan edukasi terhadap produk yang ditawarkan oleh pihak lembaga perbankan merupakan sarana yang dianggap paling tepat.

Mencermati berbagai kondisi dan juga fenomena-fenomena terkait dengan tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah yang nantinya akan dihubungkan dengan Kinerja dari Pelaku UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang, maka dalam penelitian ini judul yang akan dikaji adalah “Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil Menengah Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Berdasar kajian dalam penelitian ini maka rumusan masalah yang diajukan yakni :

1. Apakah tingkat literasi keuangan syariah secara signifikan dapat memberikan pengaruh terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang ?
2. Apakah inklusi keuangan berbasis syariah secara signifikan dapat memberikan pengaruh terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang ?

3. Apakah tingkat literasi dan inklusi keuangan berbasis syariah jika secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat Literasi Keuangan berbasis syariah terhadap kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan berbasis syariah terhadap kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi dan inklusi keuangan berbasis syariah jika secara bersama-sama terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah

- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah kaitannya dengan Peningkatan Kinerja dari para pelaku UMKM

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya berkaitan dengan kondisi tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan kepada pengelola Perbankan Syariah dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pemanfaatan produk Perbankan Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan serta dalam pembangunan nasional. (Puji Hastuti, dkk, 2020).

UMKM menurut Tulus Tambunan (2021) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha pada semua sektor ekonomi. Secara umum pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, menengah, dan besar didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap..

Pengertian dari UMKM jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang termuat dalam pasal 1 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau Usaha Besar

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kriteria tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dituangkan pada Pasal 6 dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta;

- 2) Usaha Kecil adalah unit usaha yang memiliki aset antara Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,000,-
- 3) Usaha Menengah adalah unit usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan di atas Rp.50 milyar.

Mengukur kriteria dari UMKM menurut Sri Nurmayanti (2021) bahwa selain menggunakan nilai moneter kriteria dari UMKM juga dapat dilihat dari jumlah pekerja pada usaha tersebut, hal ini didasarkan pada kriteria yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa Usaha yang dapat digolongkan sebagai Usaha Mikro adalah sebuah usaha dengan jumlah karyawan tetap hingga 4 orang, sementara untuk usaha kecil memiliki karyawan tetap hingga 19 orang.

Pandangan lain terhadap kriteria dari UMKM diuraikan pula oleh Tulus Tambunan (2020) yang mengklasifikasikan UMKM kedalam beberapa jenis yakni :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai tempat untuk berkesempatan kerja dalam hal mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah Pedagang Kaki Lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

c. Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan bahwa Asas yang dijadikan sebagai asas dalam pengelolaan UMKM terdiri dari Kekeluargaan, Demokrasi Ekonomi, Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian, Berkelanjutan, Keseimbangan Kemajuan, dan Kesatuan Ekonomi Nasional.

Berdasar pada asas penyelenggaraan UMKM tersebut maka dalam Undang-Undang tersebut, sehingga tujuan yang hendak dicapai yakni menumbuhkan dan mengembangkan

usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

d. Ciri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diuraikan bahwa usaha yang terdaftar sebagai UMKM adalah sebuah usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau dimiliki oleh sejumlah kecil orang dengan nominal kekayaan tertentu dan pendapatan tertentu, sehingga dari penjelasan tersebut maka menurut pandangan dari lin Khairunnisa bahwa ciri dari suatu UMKM dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Usaha Mikro

- a) Jenis barang dan jasa yang ditawarkan sifatnya tidak tetap, sebab selalu berusaha mengikuti trend pasar agar dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
- b) Lokasi bisnis tidak selamanya berada di satu tempat, bahkan terkadang berpindah, hal ini sering terjadi dalam rangka memperoleh konsumen yang maksimal.
- c) Belum mampu mempraktekkan sistem tata kelola manajemen keuangan secara baik, bahkan beberapa diantaranya sistem keuangan yang paling sederhana

sekali pun belum mampu diterapkan, beberapa dari pelaku UMKM dapat dikategorikan belum mampu memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan bisnis.

- d) Sumber Daya Manusia (pengusaha) masih banyak dapat dikategorikan belum memiliki jiwa wirausaha yang nantinya dapat mendukung dalam pengelolaan usaha
- e) Taraf pendidikan tidak merata, ada yang tinggi bahkan ada pula yang rendah.
- f) Akses ke lembaga perbankan masih sangat rendah, walaupun diantaranya telah memiliki rekening pada beberapa lembaga non perbankan

2) Usaha Kecil

- a) Produk dan komoditas yang dibudidayakan oleh usaha kecil biasanya bersifat tetap dan sulit diubah.
- b) Lokasi untuk usaha terkesan menetap disuatu tempat dan umumnya telah memiliki karyawan
- c) Pengelola dari usaha kecil dapat dikatakan telah memahami tentang pengelolaan keuangan, meskipun sistem yang digunakan tergolong masih sederhana.
- d) Sistem pengelolaan keuangan untuk usaha kecil dapat dikategorikan telah mampu memisahkan antara

Keuangan Rumah Tangga dan Keuangan Perusahaan sehingga keseimbangan bisnis telah terukur

- e) Secara umum usaha kecil telah mempunyai izin usaha dan persyaratan hukum lainnya, seperti NPWP.
- f) Sumber daya manusia yang dimiliki dianggap telah mempunyai pengalaman dalam wirausaha.
- g) Untuk kebutuhan modal, beberapa individu memiliki akses ke perbankan.
- h) Sebagian besar usaha kecil belum mampu menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha,

3) Usaha Menengah

- a) Telah memiliki sistem manajemen dan pengelolaan organisasi yang lebih baik.
- b) Sudah menerapkan sistem akuntansi secara berkala agar lebih mudah untuk diaudit, dinilai, atau diperiksa, termasuk oleh bank.
- c) Sudah dapat menerapkan kebijakan dalam hal sistem manajemen sumber daya manusia
- d) Telah mempunyai legalitas usaha seperti SITU, SIUP, NPWP, dan bentuk persyaratan hukum usaha lainnya
- e) Rata-rata telah memiliki akses dengan perbankan dan telah dianggap sebagai bagian yang dibutuhkan dalam

pengelolaan dan pengembangan usaha khususnya dalam hal permodalan

- f) Sumber Daya Manusia yang digunakan pada Usaha Menengah dapat dikategorikan memiliki keahlian atau setidaknya terlatih dan terdidik.

e. Tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM saat ini dipandang sebagai pelaku ekonomi yang cukup fleksibel di dalam menyesuaikan dengan berbagai perubahan iklim usaha yang terjadi, sehingga tetap mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara. Sementara disisi lain kontribusi UMKM akan semakin baik apabila permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi.

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM saat ini salah satunya sangat berkaitan dengan pemanfaatan informasi akuntansi yang tentunya sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk kelangsungan sebuah usaha. Selain itu menurut Mutiara Candra, dkk (2020) bahwa masalah yang juga banyak ditemui oleh pelaku UMKM disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, pelatihan usaha, pengalaman manajerial, kurangnya pemahaman teknologi informasi dan keandalan karakteristik laporan keuangan.

Sementara Sujarweni (2019) mengkategorikan jenis tantangan yang dihadapi oleh UMKM kedalam 2 jenis yakni :

1) Tantangan dari Sisi Internal:

Tantangan yang bersifat Internal UMKM yang dimaksud adalah

a) Modal

Masih terdapatnya kesulitan dalam hal peminjaman modal, terutama saat pengajuan kredit dilembaga keuangan perbankan, dikarenakan rata-rata pelaku UMKM khususnya usaha Mikro tidak memiliki laporan keuangan, sementara hal ini dijadikan sebagai salah satu persyaratan dari lembaga perbankan ketika pelaku usaha akan mengajukan kredit.

b) Sumber Daya Manusia (SDM),

Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya masih rendahnya tingkat pengetahuan terhadap arus perkembangan teknologi terbaru selain itu masih banyak yang kurang memperhatikan strategis maupun tujuan jangka panjang usahanya.

c) Akuntabilitas,

Masih banyaknya UMKM yang belum mempunyai administrasi keuangan dan manajemen yang baik, sehingga akan sulit mengukur tingkat akuntabilitas dari usaha tersebut.

2) Tantangan dari sisi Eksternal

Tantangan yang bersifat Eksternal terdiri dari :

a) Infrastruktur,

Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan oleh UMKM dalam menghasilkan produk

b) Akses,

Rata-rata UMKM belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah,

2. Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a. Pengertian Kinerja UMKM

Kinerja secara umum dapat diartikan dengan Prestasi atau Keberhasilan dari sebuah organisasi dalam menjalankan usaha yang dikelola, sehingga jika dihubungkan dengan Kinerja UMKM maka penjelasan yang dianggap memiliki pola hubungan kuat sebagaimana pengertian kinerja dari Hasibuan (2020), dimana dinyatakan bahwa kinerja UMKM dapat pula disebut dengan prestasi atau tingkat keberhasilan dari sebuah UMKM dengan berdasar pada beberapa hal diantaranya kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta kemampuan dari pengelola yang terlibat pada sebuah UMKM untuk dapat memanfaatkan semua sumber daya seefektif dan seefisien mungkin.

Sementara dari pandangan Pasolong (2019) Kinerja dari UMKM dapat diartikan dengan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan membandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria yang dimaksudkan didasarkan pada tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Pandangan lainnya juga dikemukakan oleh Ariyani, R (2020) bahwa Kinerja UMKM dapat diukur dari segi keuangan yang didasarkan pada hasil tindakan yang telah dilakukan dimasa lalu, dan non keuangan yang ditinjau dari sisi kepuasan pembeli, produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis/ intern serta komitmen personel/pengelola yang akan menentukan kinerja keuangan dimasa yang akan datang.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja UMKM

Kinerja dari UMKM pada dasarnya sangat dipengaruhi berbagai faktor, dimana menurut pandangan dari Anggriani (2021) bahwa faktor yang memberikan pengaruh dapat dibagi menjadi dua yakni :

1) Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja UMKM yakni :

a) Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksudkan dalam hal ini adalah semua individu yang terlibat

dalam pengelolaan suatu UMKM, olehnya itu dalam berbagai teori diuraikan bahwa Keberadaan SDM pada suatu organisasi termasuk UMKM merupakan unsur terpenting dalam mendukung keberhasilan dari sebuah usaha, sehingga sering ditegaskan bahwa pencapaian dari suatu organisasi sangat tergantung oleh SDM yang dimiliki, semakin berkualitas maka peluang keberhasilan usaha akan semakin besar.

b) Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan sebuah UMKM, olehnya itu sangat diperlukan kemampuan dalam hal tata kelola bidang keuangan yang baik, khususnya dalam pemanfaatan modal usaha tentunya harus dilakukan secara bijak. Hal dimaksudkan agar modal usaha yang dimiliki dapat dijadikan sebagai dasar dalam untuk memperoleh laba usaha yang maksimal.

Aspek keuangan juga merupakan bagian dari salah satu faktor yang menjembatani UMKM untuk mengenal dunia perbankan selain berkaitan dengan persoalan tabungan, juga dapat dihubungkan dengan kegiatan transfer atau pengambilan kredit.

c) Aspek Teknis dan Operasi

Berkaitan dengan Aspek Teknis dan Operasi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari UMKM dapat dihubungkan dengan persoalan lokasi, luas produksi, peralatan usaha, teknologi yang akan digunakan serta berbagai aspek lain dimana sifatnya sebagai faktor pendukung dalam pengelolaan sebuah usaha.

Maksud dan tujuan adanya aspek Teknis dan Operasi menjadi bagian dari faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja UMKM didasarkan pada berbagai bentuk pertimbangan yakni :

- (1) Adanya pertimbangan aspek ini diharapkan agar suatu usaha dapat menentukan lokasi secara tepat, yang intinya dengan pemilihan lokasi yang strategis tentunya akan berdampak pada tingkat penjualan dan jumlah produksi
- (2) Penentuan aspek Teknis dan Operasi yang baik tentunya dapat menentukan tingkat efesiensi dan efektifitas usaha
- (3) Melalui pertimbangan aspek ini juga dapat pula ditentukan bentuk teknologi yang akan digunakan, sebab terkadang suatu usaha harus mampu

menselaraskan teknologi yang dibutuhkan dalam mendukung semua bentuk faktor-faktor produksi.

(4) Aspek ini juga berkaitan dengan penentuan jenis usaha yang akan dikembangkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

d) Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran lebih dominan berkaitan dengan permintaan atau kebutuhan konsumen, hal ini dapat diartikan bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM agar usahanya dapat berkembang yakni tingkat penjualan dari produk usaha dan hal ini tentunya harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan konsumen. Olehnya dalam menjalankan sebuah usaha tentunya aspek ini harus menjadi pertimbangan utama agar modal usaha dapat dikelola secara maksimal.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat pula dikatakan dengan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kinerja dari sebuah UMKM yang berasal dari luar. Terdapat berbagai faktor luar dan dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM, dimana menurut pandangan dari Febriani, L (2020) faktor eksternal tersebut terdiri dari :

a) Aspek Kebijakan Pemerintah

Aspek kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih atau dilakukan secara sah oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Adapun kebijakan pemerintah jika dihubungkan dengan UMKM umumnya dalam bentuk :

- (1) Peningkatan layanan jasa keuangan
- (2) Peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan
- (3) Meningkatkan kemampuan serta penguasaan aspek-aspek teknis manajemen wirausaha seperti Manajemen Keuangan dan Administrasi Usaha, pengembangan produk serta pola-pola penjualan,

b) Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Aspek-aspek ini sifatnya lebih kepada persoalan-persoalan yang non fisik, namun pengaruhnya sangat berdampak pada kinerja UMKM. Kategori dari aspek-aspek ini lebih mengarah pada tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM seperti pola sikap atau kultur budaya masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan hal lainnya yakni adanya persaingan usaha antar pelaku UMKM.

c) Aspek Peranan Lembaga Terkait

Peranan lembaga terkait dalam hal ini selain instansi yang berada dibawah naungan pemerintah langsung juga sangat berhubungan dengan keberadaan dari lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, yang mana kesemua lembaga-lembaga tersebut tentunya diharapkan untuk dapat memberikan support terhadap pengembangan UMKM

c. Tantangan dalam Mengukur Kinerja UMKM

Mengukur kinerja UMKM di Indonesia saat ini menurut pandangan dari Eka Indra Putra (2023) diperhadapkan pada beberapa tantangan seperti :

1) Kualitas Manajemen

Pengukuran terhadap Kinerja jika merujuk pada asumsi dari berbagai ahli selalu dikaitkan dengan nilai kuantitatif perkembangan sebuah Usaha Mikro, sementara kondisi saat ini dari berbagai kajian penelitian ditemukan bahwa Kemampuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaku Usaha Mikro dalam hal tata kelola keuangan usaha masih sangat rendah, sehingga untuk mengukur kinerja khususnya untuk pengelola UMKM harus dipadukan dengan pola pembinaan khususnya berkaitan dengan sistem tata kelola keuangan.

2) Siklus Pendanaan

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Usaha Mikro jika akan dilakukan pengukuran kinerja, maka permasalahan utama yang sering dijumpai yakni terkait dengan Modal Kerja, dimana sebahagian dari pelaku Usaha Mikro belum memahami secara utuh tentang pemanfaatan fasilitas produk dari lembaga-lembaga perbankan terkait dengan kredit ringan bagi UMKM, sebab selama ini masyarakat secara umum masih dibayangi oleh permasalahan suku bunga dari kredit yang akan diperoleh.

3) Ukuran Usaha

Mengukur Kinerja Usaha Mikro selama ini masih merujuk pada Kebijakan Pemerintah yang menyamakan dengan usaha tergolong kecil atau menengah, dan terkadang alat ukur yang digunakan justeru mengacu pada perusahaan berskala besar.

Menyikapi kondisi tersebut maka menurut pandangan dari lin Khairunnisa (2022), bahwa mengukur Kinerja UMKM secara umum hal yang paling penting untuk dijadikan sebagai alat ukur dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni :

1) Input (potensi)

Pengukuran terhadap Input dalam hal ini lebih dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk

pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas lainnya. Sehingga dalam mengukur kualitas UMKM secara mandiri dapat dilakukan atas beberapa pertanyaan yakni *how* (bagaimana), *why* (mengapa), *who* (siapa), *what* (apa), *when* (kapan), dan *where* (dimana)

2) Output

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan. Agar pengukuran kinerja terhadap UMKM berkualitas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah output dari pengukuran kinerja itu sendiri, yaitu kejelasan penilaian dan keberhasilan pengukuran kinerja sebagai peningkatan kinerja

d. Indikator Kinerja UMKM

Dimensi yang dapat dijadikan sebagai alat ukur terhadap kinerja UMKM, maka menurut Ariyani, (2020) yakni :

1) Pertumbuhan Penjualan

Mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya.

2) Pertumbuhan Modal

UMKM disebut memiliki laju pertumbuhan tinggi jika mempunyai modal yang cukup membiayai pertumbuhan

tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa Makin cepat tingkat atau laju pertumbuhan UMKM makin besar kebutuhan dari sebuah usaha terhadap pembelanjaan yang dilakukan, sehingga dana yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Kemampuan tersebut akan dicapai jika pelaku UMKM mampu untuk menahan sebahagian dari keuntungannya dijadikan sebagai modal usaha.

3) Penambahan Tenaga Kerja Setiap Tahun

Bertumbuhnya suatu usaha maka dapat memberikan pengaruh terhadap Kinerja UMKM, implikasi lainnya tentu berdampak pada penambahan tenaga kerja, sehingga dapat dijabarkan bahwa UMKM ketika mampu menambah jumlah tenaga kerjanya, maka suatu usaha memiliki pertumbuhan yang dikategorikan meningkat.

4) Pertumbuhan Pasar Dan Pemasaran

Kinerja dari suatu UMKM dikategorikan meningkat dapat dipengaruhi oleh ruang lingkup dimana produk dari usaha tersebut dipasarkan, artinya bahwa jangkauan terhadap pemasaran produk suatu usaha telah diterima dan dicari oleh pelanggan yang berasal dari berbagai wilayah

5) Pertumbuhan Keuntungan/Laba Usaha

Laba yang diperoleh suatu UMKM, secara umum dapat digunakan untuk berbagai kepentingan usaha. Namun

apabila dihubungkan dengan kinerja UMKM, maka tolak ukurnya adalah banyaknya Laba yang diperoleh lebih dominan digunakan untuk kebutuhan usaha.

3. Literasi Keuangan Syariah (*Islamic Finanacial Literacy*)

a. Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

Literasi Keuangan jika didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) terdiri atas Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*), Keterampilan dalam Pengelolaan Keuangan (*Financial Skill*) dan Keyakinan dalam Penggunaan Keuangan (*Financial Confidence*) yang nantinya mempengaruhi Sikap Keuangan (*Financial Atitude*) dan Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*), dimana kesemua unsur tersebut dapat dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan usaha dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan penegasan tentang Literasi Keuangan yang dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh Briliani (2020) diuraikan bahwa Literasi Keuangan adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh individu didasarkan pada kemampuan untuk mengelola pendapatan agar tercapai peningkatan kesejahteraan finansial. Sementara Aprinthasari (2020) memberikan pengertian bahwa Literasi Keuangan

adalah kombinasi kebutuhan akan kesadaran, pengetahuan, keahlian, etika, dan sikap dalam membuat keputusan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan individu.

Merujuk pada kedua pandangan tersebut oleh Safryani (2020) merangkum menjadikan satu dengan memberikan pengertian terhadap Literasi Keuangan (*Finanacial Literacy*) yakni suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap individu untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan upaya pemahaman terhadap perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan yang tepat dan efisien.

Sementara dari sisi aspek lain Heru Kristanto (2021) menguraikan bahwa Literasi Keuangan (*Finanacial Literacy*) adalah sebuah keterampilan numerik disertai pemahaman terhadap konsep dasar ekonomi yang dibutuhkan untuk menambah pengetahuan seseorang sebagai acuan dalam mengambil keputusan terhadap proses menyimpan dan juga meminjam.

Demikian pula pernyataan yang dikemukakan oleh Moh. Zaki Kurniawan (2022) bahwa Literasi Keuangan (*Finanacial Literacy*) adalah kemampuan untuk membuat penilaian-penilaian terhadap informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan secara efektif berdasarkan

kegunaan dalam pengelolaan keuangan yang akan digunakan untuk pengelolaan usaha.

b. Komponen Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 oleh Nur Hidayah, (2021) mengemukakan bahwa komponen-komponen dalam aturan tersebut merupakan komponen yang dapat dijadikan sebagai alat untuk tingkat Literasi Keuangan (*Finanacial Literacy*) seseorang. Dasar dijadikannya komponen dalam aturan OJK Tahun 2016 sebagai alat ukur terhadap tingkat literasi keuangan seseorang didasarkan pertimbangan berikut :

1) Pengetahuan Keuangan (*Financial Konowledge*)

Pengetahuan Keuangan dijadikan sebagai alat ukur Literasi Keuangan karena sangat berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang berkenaan dengan produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan syariah, *delivery channel* dan termasuk didalamnya yakni karakteristik produk

2) Keterampilan (*Financial Skill*)

Komponen ini sering dihubungkan dengan Pengelolaan Keuangan suatu individu dan suatu usaha sebab sangat berkaitan dengan kemampuan dalam hal penyusunan rencana dan juga laporan keuangan, menghitung tentang

produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan dan perbankan seperti bunga (tabungan atau pinjaman), hasil investasi, dan biaya

3) Keyakinan (*Financial Confidence*)

Komponen ini sangat berkaitan dengan Penggunaan Keuangan dari seseorang, artinya Keyakinan (*Financial Confidence*) sering pula dihubungkan dengan tingkat keyakinan dari seseorang dalam pengelolaan keuangan serta pemanfaatan produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan atau Perbankan.

4) Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

Komponen ini memiliki hubungan erat dengan tujuan dan penyusunan rencana keuangan sebuah usaha. Sesuai maksudnya maka secara umum Sikap Keuangan seseorang baik dalam pengelolaan usaha maupun secara sering dicerminkan melalui 6 (Enam) Konsep yakni :

- a) *Obsession*, merujuk pada pola pikir seseorang dan persepsinya tentang mengelola uang dengan baik.
- b) *Power*, merujuk dimana seseorang menggunakan uang sebagai alat untuk mengendalikan orang lain dan dapat menyelesaikan masalah.
- c) *Effort*, merujuk pada seseorang yang merasa pantas memiliki uang dari apa yang sudah dikerjakannya.

- d) *Inadequacy*, merujuk pada seseorang yang selalu merasa tidak cukup memiliki uang.
- e) *Retention*, merujuk pada seseorang yang memiliki kecenderungan tidak ingin menghabiskan uang.
- f) *Security*, merujuk pada pandangan seseorang yang sangat kuno bahwa uang lebih baik hanya disimpan sendiri tanpa ditabung di bank atau untuk investasi.

5) Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Berhubungan dengan tujuan menggunakan produk dan upaya mencapai tujuan keuangan yang ditampakkan melalui seberapa bagus seseorang mengelola uang kas, mengelola utang, tabungan dan pengeluaran – pengeluaran lainnya.

c. Literasi Keuangan Syariah (*Islamic Finanacial Literacy*)

Literasi Keuangan Syariah atau sering pula dikenal dengan sebutan *Islamic Finanacial Literacy* dari penjelasan yang dikemukakan oleh Alimusa (2020) bahwa pengertiannya tidak jauh berbeda dengan pengertian Literasi Keuangan secara umum yakni tingkat pengetahuan dan pemahaman dari seseorang tentang produk dan jasa keuangan, namun hal yang membedakan pada substansinya dimana untuk Literasi Keuangan Syariah difokuskan pada Produk dan Jasa dari Lembaga Keuangan Berbasis Syariah.

Siti Alfia Ayu (2021) secara spesifik menguraikan bahwa Literasi Keuangan Syariah (*Islamic Financial Literacy*) dapat diartikan dengan kecakapan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan, keahlian dan menentukan sikapnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Literasi Keuangan Syariah berdasarkan konsep Islam menurut Nur Hidayah (2022) dimaksudkan agar kaum muslim dapat melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik. Karena dikhawatirkan saat seorang Muslim sedang menghadapi masalah terkait keuangan dapat mempengaruhi sikap dan prinsip dalam beragama.

d. Tujuan Literasi Keuangan Syariah

Tujuan pengembangan terhadap Literasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, antara lain :

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan.
- 2) Melakukan perubahan terhadap sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu memilih dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu.

Sementara Tujuan Literasi Keuangan Syariah berdasar pada pandangan dari Mifta Novianti Putri, (2022) antara lain agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.

e. Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan Syariah

Mengutip prinsip-prinsip dalam pengembangan Literasi Keuangan yang dituangkan pada *Blue Print* tentang Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, maka menurut Mifta Novianti Putri, (2022) bahwa prinsip-prinsip tersebut juga dapat diberlakukan dalam mendukung penerapan Literasi Keuangan Syariah. Adapun prinsip yang dimaksud adalah :

1) Universal dan Inklusif

Penerapan prinsip dan juga program dalam rangka meningkatkan kemampuan Literasi Keuangan Masyarakat berbasis Syariah maka cakupannya harus dapat diterima oleh semua golongan secara *rahmatan lil'alam* atau tidak semata hanya untuk umat muslim namun terbuka untuk semua agama dan golongan.

2) Sistematis dan Terukur

Memudahkan masyarakat memahami tentang prinsip-prinsip yang ada dalam Literasi Keuangan Syariah, maka hal terpenting harus dilakukan adalah mensosialisasikan semua program atau produk lembaga keuangan secara sistematis, terencana, mudah dipahami, terstruktur, sederhana dan pencapaiannya dapat diukur.

3) Kemudahan Akses

Medukung dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sistem Tata Kelola pada lembaga keuangan, dan hal ini tentunya juga diharapkan akan berdampak pada tingkat pemahaman terhadap Literasi Keuangan Syariah, Olehnya itu dalam pengelolaan Keuangan pada lembaga yang berbasis syariah maka prinsip yang harus dibangun yakni kemudahan akses layanan pada semua lembaga keuangan dan perbankan yang berbasis syariah.

4) Kemaslahatan

Mendorong agar daya minat masyarakat menjadi semakin tinggi untuk memahami Literasi Keuangan Syariah, maka prinsip kemaslahatan harus mampu diuraikan secara transparan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan tujuan utamanya berorientasi pada prinsip masalah (manfaat) yang lebih dominan untuk masyarakat secara luas.

5) Kolaborasi

Mendukung terciptanya pemahaman terhadap literasi keuangan berbasis syariah, maka melibatkan semua unsur atau stakeholder menjadi sangat penting, sebab tanpa peran serta dari berbagai pihak maka tingkat kepercayaan dari masyarakat akan menjadi sulit dikembangkan

f. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Mengukur terhadap kemampuan literasi keuangan masyarakat khususnya jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berbasis syariah, maka indikator yang terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat Literasi Keuangan berbasis Syariah dari masyarakat menurut Muna Dahlia (2020), terdiri dari :

1) Pengetahuan Dasar Tentang Keuangan Syariah

Pengetahuan dasar yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan berbasis syariah, artinya ukuran pemahaman dari masyarakat tidak semata-mata hanya berdasar pada persoalan untung atau rugi, akan tetapi pola pendekatannya lebih diorientasikan sejauh mana mereka memahami tentang pengelolaan keuangan yang dilarang dan diperbolehkan baik untuk usaha maupun kegiatan pengelolaan pribadi dalam rumah tangga.

2) Kemampuan

Pendekatan kemampuan yang dimaksud dalam mengukur tingkat literasi keuangan masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yakni keterampilan tentang literasi keuangan sehingga dapat dijadikan dasar dalam membuat keputusan yang merujuk pada informasi tentang produk dan jasa dari lembaga keuangan atau perbankan yang berbasis syariah.

3) Sikap

Orientasi terhadap Sikap Keuangan dalam hal ini adalah mengukur tingkat Pemahaman Masyarakat tentang uang berdasar pada Sumber dan Peruntukannya, termasuk dalam hal ini pemahaman terhadap sumber keuangan yang diperoleh dari perbankan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dihubungkan dengan prinsip-prinsip syariah.

4) Perilaku Keuangan Syariah

Bentuk perilaku dari seseorang jika dihubungkan dengan pengelolaan keuangan baik untuk kepentingan pribadi maupun bagi kepentingan usaha, terletak pada sejauh mana kemampuan seseorang atau pelaku usaha dalam mengefektifkan penggunaan keuangan didasarkan pada kebutuhan yang telah direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembelanjaan berbasis syariah.

5) Kepercayaan

Hasrat dan keinginan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas, produk dan jasa suatu lembaga keuangan atau perbankan yang berbasis syariah, tentunya didasarkan pada beberapa pertimbangan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa masyarakat sebelum memberikan kepercayaan kepada pilihan mereka sangat didasari oleh pertimbangan dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

4. Inklusi Keuangan Syariah

a. Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan sesuai dengan bunyi dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Keuangan Inklusi dimana pada bagian penjelasan diuraikan bahwa Inklusi Keuangan adalah kondisi ketika masyarakat telah mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Selanjutnya, akses layanan keuangan merupakan kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan dan/atau memiliki produk dari lembaga keuangan formal.

Sementara menurut pandangan dari Nasir Tajul, dkk (2022) bahwa Pengertian dari Inklusi Keuangan adalah proses

memperkenalkan suatu akses terhadap industri keuangan yang terjangkau, tepat waktu serta memadai untuk berbagai produk dan jasa keuangan yang diatur dan memperluas penggunaannya oleh semua segmen masyarakat melalui suatu pendekatan yang ada serta inovatif dan disesuaikan dengan kesadaran keuangan sebagai bentuk pendidikan untuk mempromosikan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Moh. Zaki Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa Inklusi keuangan adalah proses untuk memastikan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok rentan seperti kelompok yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan rendah pada khususnya, dengan biaya yang terjangkau, dengan cara yang adil dan transparan, oleh para pelaku kelembagaan utama.

b. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi Keuangan dengan pendekatan syariah menurut pandangan Rivaldi Setiawan (2023) merupakan suatu aktivitas atau upaya meningkatkan aksesibilitas terhadap lembaga keuangan syariah sebagai sarana bagi masyarakat mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya.

Sementara Machfud Ridha (2023) melihat bahwa konsep inklusi keuangan syariah meliputi akses dan

partisipasi yang adil serta merata dalam kerangka sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama inklusi keuangan syariah adalah keadilan, keberlanjutan, dan berbagi risiko. Selain mencakup akses terhadap lembaga keuangan syariah, inklusi keuangan syariah juga meliputi akses terhadap produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan pasar modal syariah.

Inklusi keuangan syariah sebagaimana dikemukakan oleh Vernica A. Adelia (2023) merupakan bentuk pendalaman layanan keuangan berbasis syariah yang ditujukan kepada masyarakat golongan bawah dalam rangka memanfaatkan produk dan jasa keuangan Syariah seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pinjaman dan asuransi. inklusi keuangan syariah juga dapat diartikan dengan penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa hambatan harga maupun non harga dalam penggunaannya.

c. Tujuan Inklusi Keuangan Syariah

Pasal 12 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/PJOK.07/2016 menguraikan bahwa tujuan umum dari Inklusi Keuangan adalah :

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk, jasa dan layanan keuangan formal dan syariah

- 2) Meningkatnya penyediaan dan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh lembaga keuangan formal dan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masyarakat.
- 3) Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa lembaga keuangan formal dan syariah sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Sementara oleh Machfud Ridha (2023) secara spesifik menjabarkan tujuan dari Inklusi Keuangan sebagai berikut :

- 1) Mengatasi adanya kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat, dimana diharapkan melalui inklusi keuangan syariah, kesempatan ekonomi dapat diperluas bagi individu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesenjangan ekonomi dapat tereduksi.
- 2) Memberikan akses kepada masyarakat sebagai bentuk upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* yang memiliki tujuan menghasilkan kebaikan dan menghindari keburukan, serta mengambil manfaat dan menghindari kerugian.
- 3) *Maqashid Syari'ah* merupakan nilai-nilai syariah yang tercakup dalam berbagai hukum atau dengan kata lain bahwa *Maqashid Syari'ah* cakupannya adalah Hukum Syariah, sehingga tujuan yang terkandung didalamnya

adalah menghasilkan kebaikan dan juga menghilangkan kesulitan dalam mengakses layanan keuangan, dengan menyajikan produk yang sederhana, mudah dimengerti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Pilar Inklusi Keuangan

Mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan sebuah sistem keuangan yang bersifat inklusif dan stabil, olehnya dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) maka didalamnya telah ditetapkan beberapa pilar pengelolaan Inklusi Keuangan diantaranya :

1) Pilar Edukasi Keuangan

Memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal dan syariah, meliputi aspek fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban yang diperuntukkan dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2) Pilar Hak Properti Masyarakat

Bertujuan untuk meningkatkan akses kredit/pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.

3) Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi

Bertujuan untuk memperluas akses dan jangkauan masyarakat dari berbagai kelompok dalam mendapatkan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan.

4) Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai.

5) Pilar Perlindungan Konsumen

Bertujuan menyediakan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan layanan keuangan serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan informasi konsumen

e. Indikator Inklusi Keuangan Syariah

Indikator yang dijadikan dasar dalam mengukur Inklusi Keuangan khususnya dikaitkan dengan prinsip-prinsip keuangan Syariah menurut pandangan dari Wilda Dinda Pratiwi (2023) terdiri dari :

1) Pemahaman Terhadap Produk Keuangan Syariah

Pemahaman terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Perbankan Syariah sebagai dasar dalam mendorong kesadaran dari masyarakat untuk memiliki

keinginan berinteraksi dengan suatu Lembaga Keuangan. Melalui pemahaman terhadap produk dan jasa yang ditawarkan akan dapat menghindarkan masyarakat dari kesalahan memilih produk atau jasa yang dibutuhkan

2) Akses (*Aksesibilitas*);

Akses dalam hal ini terkait infrastruktur yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah agar masyarakat dapat menjangkau secara luas di antara penggunaanya, dengan kata lain indikator ini mengukur sejauh mana kemampuan dari seorang nasabah dalam mengakses produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan atau perbankan dimanapun dan kapanpun;

3) Ketersediaan Produk dan Jasa Keuangan (*Availability*);

Mengukur kemampuan dari Lembaga Keuangan Syariah dalam menyediakan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan seluruh golongan masyarakat. *Availability* juga dapat diartikan bahwa Produk dan Jasa Layanan dari Lembaga Keuangan Formal dan Syariah dapat digunakan oleh semua golongan tanpa dibedakan.

Availability juga berkaitan dengan kelengkapan layanan keuangan syariah seperti adanya M-Banking, kantor cabang, produk-produk bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat atau sesuai dengan sasaran pasar

produk, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna atau calon nasabah dalam bertransaksi.

4) Kualitas (*Quality*)

Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat secara aktif yang berarti produk dan layanan jasa keuangan “fit” dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga volume atau frekuensi penggunaannya relatif tinggi.

5) Penggunaan (*Usage*);

Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap kajian tentang Pengaruh Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Cemba Kabupaten Enrekang yakni :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	Penulis	Heriyati Chrisna, Hernawaty, Noviani
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Pelaku UMKM Di Desa Pematang Serai
	Variabel Penelitian	Literasi Keuangan Syariah Perkembangan Usaha Pelaku UMKM
	Temuan Penelitian	Literasi keuangan syariah secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM. Penyebabnya karena Penyelenggaraan Kegiatan Keuangan Syariah sendiri tidak memahami secara baik tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Syariah, sehingga tidak mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya Pelaku UMKM
2	Penulis	Agista Berliana, Amillia Atika Suri
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia
	Variabel Penelitian	Pembiayaan, Pengembangan Usaha, UMKM, Bank Syariah
	Temuan Penelitian	Bank Syariah dalam mendukung sektor UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM, dengan menyediakan instrument pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Bank Syariah memungkinkan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, mendorong pertumbuhan usaha, dan meningkatkan kesempatan ekspansi. Melalui pendekatan yang berbasis keadilan dan kemitraan, bank syariah mendorong hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan UMKM
3	Penulis	Ahmad Fauzi, Indri Murniawaty
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah

	<i>Variabel Penelitian</i>	Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Dan Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah
	<i>Temuan Penelitian</i>	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Terdapat pengaruh positif dan signifikan Religiusitas terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Hasil Analisis keduanya menunjukkan tingkat minat menjadi nasabah cukup besar terutama dipengaruhi oleh unsur Literasi Keuangan
4	<i>Penulis</i>	Mifta Novianti Putri
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Soreang Parepare
	<i>Variabel Penelitian</i>	Literasi Keuangan Syariah, Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah
	<i>Temuan Penelitian</i>	Literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini berarti apabila tingkat literasi keuangan pelaku UMKM semakin tinggi maka kinerja yang dapat dicapai akan semakin meningkat. Keberhasilan atau kegagalan UMKM sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan kemampuan pelaku usaha
5	<i>Penulis</i>	Evriyenni
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Banda Aceh
	<i>Variabel Penelitian</i>	Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
	<i>Temuan Penelitian</i>	Faktor pengetahuan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM Faktor kemampuan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM Faktor Sikap keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Namun diharap lebih mengembankan sikap keuangan yang baik dalam pengelolaan usaha agar capaian kinerja lebih optimal
6	<i>Penulis</i>	Rivaldi Setiawan
	<i>Tahun Penelitian</i>	2023
	<i>Judul Penelitian</i>	Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Syiah Kuala

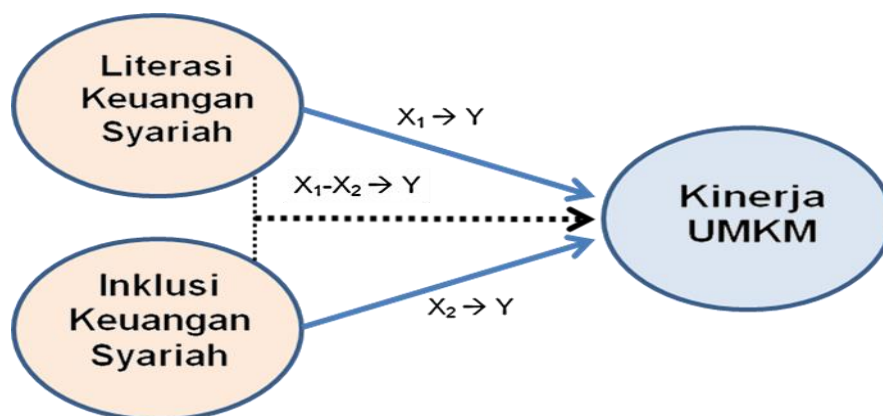
	<i>Variabel Penelitian</i>	Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Syariah Kinerja Usaha Mikro Kecil
	<i>Temuan Penelitian</i>	<i>Literasi Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM, yang artinya semakin baik tingkat literasi keuangan Pelaku UMKM maka kemampuan dalam melakukan pengembangan usaha akan semakin baik</i> <i>Inklusi Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja UMKM, hal ini dapat diartikan bahwa Pelaku UMKM mampu memiliki akses dan pemahaman dalam menentukan produk yang dibutuhkan, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha</i>
6	<i>Penulis</i>	Edy Jumady, Ardiansyah Halim, Dewi Manja, Nurul Qaisah Amaliah
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kota Makassar</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Kinerja Usaha Kecil
	<i>Temuan Penelitian</i>	<i>Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, hal ini membuktikan bahwa seorang pengusaha yang memiliki literasi keuangan atau lebih dikenal dengan pemahaman keuangan akan mampu meningkatkan kinerja usaha yang sedang dijalankan, sehingga lebih mudah menghadapi resiko keuangan yang mungkin akan terjadi</i> <i>Inklusi keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja UMKM, semakin rendah akses dari pelaku usaha dalam penggunaan produk lembaga perbankan, maka berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pengembangan usaha yang dilakukan</i>
7	<i>Penulis</i>	Senda Yunita Leatemia
	<i>Tahun Penelitian</i>	2023
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
	<i>Temuan Penelitian</i>	<i>Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, yang artinya dengan adanya kemampuan literasi keuangan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kinerja pada usaha yang dijalankan</i> <i>Inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap</i>

8		kinerja UMKM. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha tidak banyak memiliki pilihan kesempatan untuk bisa mendapatkan layanan dari lembaga keuangan dalam membantu keuangan usahanya
	Penulis	Dian Wulandari
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Area Relokasi Alun-Alun Kejaksaan Cirebon)
	Variabel Penelitian	Literasi, Inklusi Keuangan Syariah Kinerja UMKM
	Temuan Penelitian	Literasi keuangan syariah secara parsial memiliki pengaruh, positif dan signifikan terhadap variabel kinerja UMKM, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa literasi keuangan bagi masyarakat sangat penting dan juga untuk investasi di masa depan dalam perkembangan UMKM Inklusi keuangan syariah secara parsial memiliki pengaruh, positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Hal tersebut dikarenakan dengan inklusi keuangan dapat membantu masyarakat untuk dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari pihak lembaga keuangan dalam memulai & membantu meningkatkan perkembangan ekonomi pada bidang UMKM

D. Kerangka Konseptual

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dianalisis dalam Kajian ini, maka kerangka konseptual yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan

$X_1 \rightarrow Y$: Pengaruh Literasi Keuangan Berbasis Syariah Terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang

$X_2 \rightarrow Y$: Pengaruh Inklusi Keuangan Berbasis Syariah Terhadap Kinerja UMKM di Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang

$X_1-X_2 \rightarrow Y$: Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah secara bersama-sama terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang

E. Hipotesis

Merujuk pada kerangka konseptual yang diakan dikaji dalam penelitian ini maka Hipotesis yang diajukan yakni :

Model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Hipotesis alternatif yakni :

- 1) H_0 diterima dan H_a di tolak jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai Sig hasil analisis $> \text{Sig} (\alpha) = 0.05$
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai Sig hasil analisis $< \text{Sig} (\alpha) = 0.05$

Sifat Pengajuan Hipotesis dalam penelitian ini dikategorikan pada arah yang positif, maka dari variabel-variabel yang digunakan Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H_1 = Diduga Literasi Keuangan Berbasis Syariah Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang

H_2 = Diduga Inklusi Keuangan Berbasis Syariah Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang

H_3 = Diduga Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah jika secara bersama-sama Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Ansori, M. (2020) adalah sebuah metode utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan, juga demi menentukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Berdasar pada penjelasan tersebut sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini maka pendekatan yang dipilih yakni melalui metode kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2020) bahwa Metode Kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian sosial yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Pemilihan lokasi penelitian menurut Sugiyono (2020) harus didasarkan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih sehingga nantinya penelitian akan memperoleh atau menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Berdasar pada

kajian teori tersebut serta menyesuaikan permasalahan yang akan dikaji maka objek penelitian ini adalah Pelaku UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang

2. Waktu Penelitian

Sesuai dengan estimasi waktu yang direncanakan, maka untuk melakukan penelitian ini diperkirakan selama 3 (Tiga) bulan dimulai dari tahapan perencanaan penelitian, penyebaran kuisisioner, pengolahan dan analisis data, yang dijadwalkan pada bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024

C. Jenis dan Sumber Data

Data secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari fakta yang bisa berbentuk angka, simbol, maupun tulisan yang diperoleh melalui proses pengamatan subjek penelitian dan bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, dimana sumbernya dapat diperoleh dari manapun yang terpercaya. (Arikunto, 2020). Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari :

1. Jenis Data Berdasarkan Sifatnya

Jenis data berdasarkan sifatnya menurut Abubakar (2021) dapat dibagi menjadi 2 (Dua) yakni :

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan yang diperoleh dari hasil isian kuisisioner atau data berupa angka yang dapat distatistikkan. Data kuantitatif

biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data ini umumnya diolah memakai teknik perhitungan matematika.

b. Data Kualitatif

Merupakan data yang berbentuk selain angka yang dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata. Sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti tidak dapat digunakan pada analisis statistik..

2. Jenis Data Berdasarkan Sumbernya

Jenis data berdasarkan sumbernya menurut Abubakar (2021) adalah subyek dimana data diperoleh, sebab jika tidak tepat akan dapat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan. Sesuai dengan jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi :

a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2020) adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode survey melalui penyebaran

kuisisioner terhadap para pelaku UMKM, sehingga nantinya akan diperoleh gambaran tentang Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan para Pelaku UMKM.

b. Data Skunder

Data Skunder menurut Sugiyono (2020) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, data-data tersebut dapat berupa dokumentasi, referensi buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah atau variabel yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020) merupakan langkah strategis yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian, sebab salah satu tujuan utama dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode antara lain :

1. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakuka pada sebuah penelitian dalam rangka mengamati perilaku dari objek yang diteliti (unsur manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini lebih diorientasikan pada Tingkat Literasi Keuangan Syariah (*Islamic Financial Literate*) dari pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan usaha

2. Penyebaran Angket/Kuesioner.

Metode dengan penyebaran Angket atau Kuisisioner, dimana menurut Darwin, Muhammad dkk (2021) kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap.

Pertanyaan atau pernyataan kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Kurang Setuju (KS)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Pemilihan skala seperti ini dimaksudkan untuk menghindari jawaban yang sifatnya ambigu. Ciri khas dari skala Likert bahwa semakin tinggi skor/nilai yang diberikan mempunyai indikasi bahwa responden menunjukkan sikap semakin positif terhadap obyek yang diteliti. Skala Likert digunakan karena mempunyai banyak kemudahan dalam menyusun pertanyaan..

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mempelajari sumber-sumber berupa tulisan-tulisan atau buku-

buku serta kajian-kajian yang berhubungan dengan penelitian. Adapun metode yang digunakan yakni : Pengkajian sumber rujukan (Buku dan Referensi) dan Pengumpulan data berupa jurnal atau berita yang dianggap dapat mendukung kajian penelitian melalui jaringan internet.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2020) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah pelaku UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang yakni sebanyak 61 Usaha

2. Teknik Pengambilan Sampling

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Probability Sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel melalui metode Simple Random Sampling (Sugiyono 2020).

Berdasar pada pandangan tersebut maka dalam penentuan jumlah sampel tentunya harus memperhatikan alat analisis yang

digunakan, dimana dalam penelitian ini alat analisis data yang digunakan yakni SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), sehingga dengan melihat jumlah populasi sebanyak 61 Usaha, maka mekanisme penentuan sampel yang dilakukan merujuk pada pernyataan dari Darwin, Muhammad dkk (2021) bahwa apabila populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua, atau menggunakan Sampel Poulasi. Karena jumlah Populasi dalam Penelitian ini sebanyak 61 UMKM atau di bawah angka 100 maka model sampel yang digunakan yakni Sampel Populasi.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka konseptual yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian dimana diketahui bahwa variabel akan dikaji terbagi kedalam 2 (dua) kelompok yakni Variabel Bebas atau sering disebut dengan Variabel Independen dan Variabel Terikat atau Dependen. Penjelasan dari masing-masing kelompok variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Variabel* Bebas atau Variabel *Independen*

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2020), dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai Variable *Independen* adalah :

a. Literasi Keuangan Syariah-(X1)

Literasi Keuangan Syariah atau biasa disebut dengan *Islamic Finanacial Literacy* merupakan tingkat pengetahuan atau

pemahaman seseorang tentang produk dan jasa keuangan, yang difokuskan pada Produk dan Jasa pada Lembaga-Lembaga Keuangan Berbasis Syariah

Mengukur tingkat Literasi Keuangan Berbasis Syariah dari, maka indikator yang digunakan merujuk pada pandangan dari Muna Dahlia (2020) dimana indikator yang dimaksud yakni :

1) Pengetahuan Dasar Tentang Keuangan Syariah

Pendekatannya diorientasikan pada sejauh mana masyarakat memahami tentang pengelolaan keuangan yang dilarang dan diperbolehkan baik untuk usaha maupun keuangan pribadi di rumah tangga.

2) Kemampuan

Ukurannya adalah keterampilan tentang literasi keuangan sehingga dapat dijadikan dasar dalam membuat keputusan yang merujuk pada informasi tentang produk dan jasa dari lembaga keuangan atau perbankan yang berbasis syariah

3) Sikap

Orientasi terhadap Sikap Keuangan dalam hal ini adalah mengukur tingkat Pemahaman Masyarakat tentang uang berdasar pada Sumber dan Peruntukannya

4) Perilaku Keuangan Syariah

Sejauh mana kemampuan seseorang atau pelaku usaha dalam mengefektifkan penggunaan keuangan didasarkan

pada kebutuhan yang direncanakan dengan proses penggunaannya dimana keduanya dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembelanjaan berbasis syariah.

5) Kepercayaan

Kepercayaan dapat diartikan bahwa masyarakat ketika menetapkan pilihannya untuk menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dan perbankan tentunya didasarkan pada berbagai bentuk pertimbangan termasuk resiko dari transaksi yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip keuangan syariah.

b. Inklusi Keuangan Syariah-(X2)

Kondisi ketika masyarakat telah mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan lembaga keuangan berbasis syariah yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Mengukur inklusi keuangan masyarakat, maka menurut Wilda Dinda Pratiwi (2023) indikator yang dapat digunakan adalah :

a) Pemahaman Terhadap Produk Keuangan Syariah

Melalui pemahaman terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan khususnya yang

Berbasias Syariah, maka masyarakat dapat menghindari kesalahan dalam memilih produk atau jasa sesuai yang dibutuhkan.

b) Akses (*Aksesibilitas*)

Indikator ini mengukur sejauh mana kemampuan dari seorang nasabah dalam mengakses produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan atau perbankan dimanapun dan kapanpun

c) Ketersediaan Produk dan Jasa Keuangan (*Availibility*)

Availibility yang dijadikan alat ukur berkaitan dengan kelengkapan layanan dari lembaga keuangan berbasis syariah seperti adanya M-Banking, kantor cabang, produk-produk bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat atau sesuai dengan sasaran pasar produk, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna atau calon nasabah dalam bertransaksi.

d) Kualitas (*Quality*)

Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat secara aktif yang berarti

produk dan layanan jasa keuangan “fit” dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga volume atau frekuensi penggunaannya relatif tinggi.

e) Penggunaan (*Usage*)

Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Variable Terikat atau Variabel *Dependen*

Variabel Terikat atau variabel dependen, menurut Sugiyono (2020) sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari variabel Bebas atau Variabel Independen. Sehingga merujuk pada Rumusan Masalah dan Kerangka Konsep yang dibangun dalam penelitian ini maka untuk Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja UMKM (Y)

Kinerja UMKM adalah hasil kerja yang dicapai oleh UMKM pada periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu serta menyesuaikan dengan peran atau tugas dari tujuan UMKM.

Indikator yang digunakan dalam mengukur Kinerja UMKM menurut Ariyani, (2020), merujuk pada :

a) Pertumbuhan Usaha

Mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu, dimana alat ukurnya yakni semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu usaha, artinya dengan adanya pertumbuhan terhadap suatu usaha maka dapat dikategorikan penerapan strategi penjualan dianggap berhasil.

b) Pertumbuhan Modal

UMKM disebut memiliki laju pertumbuhan tinggi jika mempunyai modal yang cukup membiayai pertumbuhan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa makin cepat tingkat atau laju pertumbuhan UMKM makin besar pula kebutuhan dari sebuah usaha terhadap kegiatan pembelanjaan yang dilakukan, sehingga dana yang dibutuhkan juga akan semakin besar.

c) Penambahan Tenaga Kerja Setiap Tahun

Bertumbuhnya suatu usaha maka akan memberikan pengaruh terhadap Kinerjanya, implikasi lainnya tentu berdampak pada penambahan tenaga kerja, sehingga dapat dijabarkan bahwa UMKM ketika mampu menambah jumlah tenaga kerjanya, maka pertumbuhannya dikategorikan meningkat

d) Pertumbuhan Pasar Dan Pemasaran

Kinerja dari suatu UMKM dikategorikan meningkat dapat dipengaruhi oleh ruang lingkup dimana produk dari usaha

tersebut dipasarkan, artinya jangkauan terhadap pemasaran produk suatu usaha telah diterima dan dicari oleh pelanggan yang berasal dari berbagai wilayah atau tempat.

e) Pertumbuhan Keuntungan/Laba Usaha

Laba yang diperoleh suatu UMKM, secara umum dapat diperuntukkan pada berbagai kepentingan termasuk dalam hal ini kebutuhan konsumsi rumah tangga. Olehnya itu jika dihubungkan dengan kinerja dari suatu usaha, maka tolak ukurannya adalah seberapa besar laba yang diperoleh dapat digunakan untuk penambahan modal usaha.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas menurut Darwin, Muhammad dkk (2021) digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner, dimana dikatakan sah atau tidak jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini, bisa dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1) Membandingkan Nilai r_{Hitung} dengan Nilai r_{Tabel}

- a) Jika nilai $r_{Hitung} > r_{Tabel}$, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid.
- b) Jika nilai $r_{Hitung} < r_{Tabel}$, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid.

2) Membandingkan Nilai *Sig. (2-tailed)* dengan Probabilitas 0,05

- a) Jika nilai *Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ dan *Pearson Correlation* bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid.
- b) Jika nilai *Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ dan *Pearson Correlation* bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid.
- c) Jika nilai *Sig. (2-tailed)* $> 0,05$, maka item soal angket tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menurut Darwin, Muhammad dkk (2021) digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, sehingga dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil.

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini menurut Sugiyono (2020) dapat diketahui dengan tinjauan analisis berikut :

- 1) Apabila variabel yang diteliti mempunyai *cronbach's alpha* (α) $> r_{tabel}$ maka variabel tersebut dikatakan reliabel
- 2) Sebaliknya *cronbach's alpha* (α) $< r_{tabel}$ maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel.

Tingkat Reliabilitas dengan metode *Cronbach Alpha* diukur berdasarkan skala yan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 sampai dengan 0,20	Kurang Reliabel
0,21 sampai dengan 0,40	Agak Reliabel
0,41 sampai dengan 0,60	Cukup Reliabel
0,61 sampai dengan 0,80	Reliabel
0,81 sampai dengan 1,00	Sangat Reliabel

Sumber : Sugiyono (2017)

2. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Darwin, Muhammad dkk (2021) menguraikan bahwa Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid.

Pengujian untuk Uji Normalitas dilakukan melalui analisis *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* melalui program SPSS, Adapun dasar pengambilan keputusan menurut Sugiyono (2020) dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai Probabilitas (*Asymtotic Significance*) hasil analisis dengan nilai Signifikansi 0,05, Pernyataan yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap hasil perbandingan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.

- b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Sugiyono (2020) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Independen terhadap variabel dependen. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun persamaan untuk melakukan Analisis Regresi Linear Berganda yakni :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Di mana:

Y	= Variabel Kinerja UMKM
X1	= Literasi Keuangan Syariah
X2	= Inklusi Keuangan Syariah
$\beta_1, \beta_2,$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
a	= Konstanta

Dasar pernyataan terhadap hasil analisis regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terhadap Nilai Konstanta yang diperoleh menunjukkan Kinerja UMKM, sehingga jika nilai koefisien regresi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah memiliki nilai 0, maka dapat dinyatakan bahwa nilai untuk Kinerja UMKM sebesar Nilai Konstanta diperoleh.
- b. Berdasarkan persamaan koefisien regresi menunjukan bahwa Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, mempunyai arah regresi positif dengan Nilai Kinerja UMKM sebagaimana ditunjukkan pada nilai $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, yang berarti bahwa apabila

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah mengalami peningkatan 1% maka Kinerja UMKM dinyatakan meningkat sebesar persentase dari nilai yang dapat dilihat pada nilai β_1 , β_2 , β_3 , dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menurut Sugiyono (2020) digunakan untuk mengetahui prosentasi perubahan Variabel Dependen (Y) yang disebabkan oleh Variabel Independen (X). Jika R^2 semakin besar, maka prosentase perubahan Variabel Dependen (Y) yang disebabkan oleh Variabel Independen (X) semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil, maka prosentase perubahan akan menunjukkan pengaruh sebaliknya

Uji R Square (R^2) atau Uji Determinan menurut Darwin, Muhammad dkk (2021) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu, jika diperoleh hasil pengukuran yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.

Adapun tingkat Korelasi atau Determinan dapat diukur dengan menggunakan skala berikut :

1. Jika Hasil Uji Determinan < 0 maka dapat dinyatakan tidak terdapat Korelasi antara Variabel dalam penelitian

2. Jika Hasil Uji Determinan 0 s.d 0,49 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap lemah
3. Jika Hasil Uji Determinan = 0,50 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dapat dianggap Moderat
4. Jika Uji Determinan 0,51 s.d 0,99 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap Kuat
5. Jika Uji Determinan > 1 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap Sempurna

5. Uji Hipotesis

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi.

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji t atau Uji Parsial dengan model *One Sample Test* bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh dari variable yang dihipotesiskan, menurut Sugiyono (2020) pengujian secara parsial dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikan hasil pengujian dengan nilai signifikan yang dijadikan standar. Uji t (t-test) juga pada

dasarnya melakukan pengujian terhadap koefisien nilai t hitung dengan hasil analisis sehingga dikatakan sebagai uji regresi secara parsial.

Uji t (t-test) dengan menggunakan SPSS dilakukan dengan membandingkan antara t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai sig hasil analisis $> \text{Sig} (\alpha) = 0.05$
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau sig hasil analisis $< \text{Sig} (\alpha) = 0.05$

Cara pengujian parsial terhadap variable independen dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikan t dari hasil analisis masing-masing variable lebih kecil dari nilai signifikan 5% (0,05), maka secara parsial variable independen berpengaruh terhadap variable dependen.
- 2) Jika nilai signifikan t dari masing–masing variable lebih besar dari nilai signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5 % (0,05) maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen.

b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F adalah bentuk pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel Independen ($X_1, X_2, \dots$) secara bersama-sama

terhadap Variabel Dependen (Y). Adapun dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan ini adalah :

- 1) Menentukan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif :
 - a) H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau nilai Sig hasil analisis $> \text{Sig}(\alpha) = 0.05$
 - b) H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau Sig hasil analisis $< \text{Sig}(\alpha) = 0.05$
 - 2) Membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} yang tersedia pada ($\alpha=5\%$) dengan rumus $df=k; n-(k+1)$ dan Nilai Signifikansi hasil analisis dengan $\text{Sig}(\alpha) = 0.05$
- Hasil dari statistik tersebut diukur dengan metode pengambilan keputusan berikut :
- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai probabilitas (Sig. F) $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak atau dapat diambil kesimpulan bahwa secara Simultan ada pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y)
 - b) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ dan nilai probabilitas (Sig. F) $\geq$ (0,05) maka H_0 diterima atau dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang yang beribukota di Kecamatan Enrekang jika ditinjau berdasarkan tata letak dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar berada dibagian Sebelah Utara, dimana jarak antara ibukota Kabupaten dengan Ibukota Provinsi sekitar terletak $\pm$ 235 Km atau jika ditempuh dengan jalur darat kurang lebih 5-6 Jam perjalanan.

Kabupaten Enrekang sesuai alur sejarah yang dikembangkan oleh para tokoh masyarakat memberikan gambaran bahwa pada Abad ke XIV, kawasan-kawasan yang ada di Enrekang berada dalam satu federasi yang disebut dengan Maempong Bulan, yang memerintah di 7 Kawasan dimana saat itu lebih dikenal dengan sebutan “Pitu Massenrempulu” yakni Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, Letta, dan Baringin. Kawasan-kawasan tersebut berada dibawah kekuasaan dari To Manurung

Kata Massenrempulu berasal dari kata Massere-Bulu (Bugis) atau dapat diartikan dengan Daerah-daerah yang berada sekitar pegunungan, dan ketika masa jaya kerajaan mulai berkuasa maka kawasan Enrekang berubah menjadi Lima Kawasan atau dikenal dengan sebutan Lima Massenrempulu yakni : Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, Dan Batu Lappa.

Ketika dilakukan pembentukan pemerintahan kabupaten Sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, maka daerah-daerah yang sebelumnya merupakan bagian dari Konfederasi atau Federasi Massenrempulu dipecah menjadi beberapa distrik, dan kawasan Massenrempulu sendiri menjadi Kewedanaan Enrekang, selanjutnya sesuai dengan pembagian wilayah maka yang menjadi bagian dari Kewedanaan Enrekang adalah semua daerah yang awalnya menjadi bagian dari kerajaan Endekan, Duri Dan Maiwa, setelah berubah menjadi Swapraja dimana pucuk pimpinan pemerintahan disebut dengan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) maka wilayah yang dibawahinya terdiri dari Enrekang, Alla, Buntu Batu, Malua, dan Maiwa.

Awal Enrekang terbentuk menjadi Daerah Kabupaten memiliki 10 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km² dimana populasi penduduk waktu itu ± 190.579 Jiwa, dimana rata-rata penduduk di Kabupaten Enrekang memeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian. Setelah diterbitkannya PERDA Kabupaten Enrekang Nomor : 4,5,6 dan 7 Tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan Definitif, maka sampai pada saat ini Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan Defenitif yakni :

1. Enrekang ibukotanya Enrekang,
2. Maiwa ibukotanya Maroangin,
3. Anggeraja ibukotanya Cakke,

4. Baraka ibukotanya Baraka,
5. Alla ibukotanya Belajen,
6. Curio ibukotanya Curio,
7. Bungin ibukotanya Bungin,
8. Malua ibukotannya Malua,
9. Cendana ibukotanya Cendana,
10. Baroko ibukotanya Baroko,
11. Buntu Batu ibukotanya Pasui, dan
12. Masalle ibukotanya Lo'ko.

Kecamatan-kecamatan Defenitif tersebut membawahi 112 Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 Desa

B. Desa Cemba Kecamatan Enrekang

1. Gambaran Singkat Desa Cemba

Desa Cemba merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Cemba sesuai Data Badan Pusat Statitistik yakni 9,2 Km² atau 3,16% dari 291.19 Km² Total Luas Kec. Enrekang, yang tingkat kepadatan penduduk untuk Desa ini berkisar 166,30 Jiwa per Kilometer Persegi dan merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar bersama dengan Desa Karueng dan Tuara.

2. Kondisi Geografis Desa Cemba

Desa Cemba sesuai dengan pemetaan pewilayahan merupakan salah satu Desa di Enrekang yang berbatasan dengan Kabupaten lain yakni Kabupaten Pinrang. Adapun Batas-Vatas dari Wilayah Desa Cemba dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tungka Kecamatan Enrekang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinang dan Kel. Leoran Kecamatan Enrekang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaseralau Kecamatan Batu Lappa Kab. Pinrang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karueng Kecamatan Enrekang.

Mempertegas tentang batas-batas tersebut dapat dilihat pada peta Wilayah Kabupaten Enrekang berikut :

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Enrekang



Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan

Desa Cwmba sendiri memiliki jarak sejauh 5 Km, atau merupakan salah satu Desa yang terdekat dari Ibukota Kecamatan. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Juppandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Demografis Desa Cemba

Terhadap kondisi yang berkaitan dengan keadaan Demografis dari Desa Cemba dapat disajikan pada beberapa Tabel berikut :

1. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di Desa Cemba terdiri dari Tiga Musim yakni : Musim Hujan, Kemarau dan Musim Pancaroba. Dimana Musim Hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, Musim Kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Cemba sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.304 Jiwa terdiri dari 662 Laki-Laki dan 642 Perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 315 Keluarga. Kondisi Kependudukan Desa Cemba secara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun Membura	199	179	378	96
2.	Dusun Cemba	333	331	664	153
3.	Dusun Katimbang	130	132	262	66
Jumlah		662	642	1.304	315

Sumber : Data Kependudukan Desa Cemba Tahun 2022

3. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
297	61	11	239

Sumber : Data Kependudukan Desa Cemba Tahun 2022

D. Visi dan Misi Desa Cemba

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Cemba Yang Maju, Adil, Aman Dan Sejahtera Yang Diridhoi Oleh Allah SWT

2. Misi

- a. Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- b. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat

- c. Menciptakan iklim kondusif
- d. Pemberdayaan kelembagaan.

E. Struktur Pemerintahan Desa Cemba

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Cemba



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.

1. Deskripsi Hasil Penyebaran Kuisisioner

Mengukur tingkat pengaruh Pengaruh Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang, maka dari hasil penyebaran kuisisioner terhadap 61 Responden, dinyatakan bahwa semua telah melakukan pengisian terhadap pertanyaan dan pernyataan dalam kuisisioner.

Kuisisioner hasil isian dari responden setelah dilakukan analisis awal, maka dapat dinyatakan bahwa isian responden pada Kuisisioner dinyatakan dapat dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini dan akan diolah dengan menggunakan alat analisis SPSS atau *Statistikal Package for the Social Sciens*.

2. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden dalam penelitian ini sesuai dengan isian kuisisioner dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frequency	Percent
Jenis Kelamin	Laki-Laki	23	37.7
	Perempuan	38	62.3
Jenjang Pendidikan	S1	6	9.8
	SMA/SMK	55	90.2

Sambungan dari Tabel 5.1 : Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frequency	Percent
Umur	21-25 Tahun	2	3.3
	26-30 Tahun	10	6.6
	31-35 Tahun	15	24.6
	36-40 Tahun	21	44.3
	41-45 Tahun	8	13.1
	46-50 Tahun	5	8.2
Jenis Usaha	Pengrajin Gula Merah	4	6.6
	Penjual Campuran	35	57.4
	Penjual Gorengan	14	23.0
	Usaha Bengkel	3	4.9
	Usaha Salon	1	1.6
	Penjual Bakso	4	6.6
Total Responden		61	100,00

Data diolah dengan menggunakan SPSS 2.5

Hasil analisis terhadap kuisioner yang telah disebarkan untuk kemudian diolah dalam rangka mencermati karakteristik dari responden, maka telah diperoleh gambaran sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 61 Orang yang telah ditetapkan menjadi sampel dapat dinyatakan bahwa UMKM lebih dominan oleh Kaum Perempuan dengan Persentase 62,3%. Gambaran ini menunjukkan bahwa selain sikap telaten yang dimiliki oleh Kaum Perempuan, juga terdapat faktor lain sehingga UMKM Binana Pemerintah Desa Cemba banyak digeluti oleh Kaum Perempuan yakni mereka mendukung usaha keluarga dengan berusaha secara mandiri.

Sementara dari Umur Responden dapat dikatakan bahwa Pengelola UMKM yang menjadi responden rentang usianya yakni antara 21 Tahun hingga 50 Tahun, dan sesuai kondisi lapangan bahwa untuk Pelaku UMKM rentang usia 46-50 Tahun bergerak

dibidang usaha Pengelolaan Gula Merah dan sebahagian lagi adalah Penjual Campuran, sementara untuk rentang usia antara 21-35 Tahun dan masih tergolong muda, dimana sebahagian besar bergerak di usaha salon kecantikan, penjual gorengan dan Bengkel. Sementara untuk rentang usia 36-50 lebih dominan pada usaha Penjual Campuran yang sifatnya menetap, artinya mereka melakukan usaha di rumah.

Tingkat Pendidikan dari para responden dapat dikatakan hampir seluruhnya memiliki jenjang pendidikan Setara SMA, adapun mereka dengan pendidikan setara Sarjana hanya 7 Orang dan mereka banyak bergerak dibidang usaha Penjual Gorengan, alasan mereka untuk bergelut dibidang usaha tersebut selain menyikapi persaingan kerja yang sangat ketat, pertimbangan lainnya mereka melihat bahwa kondisi desa Cemba yang dapat dikatakan telah banyak bersentuhan dengan pola hidup dari masyarakat perkotaan sehingga pola konsumsi mereka juga mulai berubah. Hal lainnya bahwa Makanan dalam bentuk Gorengan menjadi menu simple untuk disajikan jika terdapat pertemuan atau perlumpulan baik sifatnya formal dan non formal.

Jenis UMKM yang dominan di Desa Cemba yakni Usaha Penjual Campuran, artinya usaha semacam ini masih memiliki peluang cukup besar dalam melayani kebutuhan dari masyarakat, terlebih lagi kondisi di Kabupaten Enrekang dimana waktu pasar

hanya terjadi pada hari-hari tertentu, maka kehadiran dari penjual barang campuran adalah alternatif penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian mereka.

B. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Titik tolak yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menentukan valid atau tidaknya hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh responden dan untuk menentukan apakah hasil pengisian tersebut dapat dijadikan acuan sebagai alat ukur pada sebuah penelitian, maka dapat dinilai melalui dua cara yakni :

3) Membandingkan Nilai r_{Hitung} dengan Nilai r_{Tabel}

- c) Jika nilai r_{Hitung} (*Pearson Corelation*) $> r_{Tabel}$, maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid.
- d) Jika nilai r_{Hitung} (*Pearson Corelation*) $< r_{Tabel}$, maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan tidak valid.

4) Membandingkan nilai Sig (2-Tailed) hasil analisis dengan Nilai Sig (α) = 0,05

- a) Jika nilai Sig (2-Tailed) $<$ Nilai Sig (α) = 0,05 maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid.
- b) Jika nilai Sig (2-Tailed) $>$ Nilai Sig (α) = 0,05 maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan tidak valid.

Merujuk pada salah satu dasar pengambilan keputusan untuk mengukur tingkat validitas suatu penelitian yakni

dengan memperbandingkan antara nilai r_{Tabel} , maka langkah yang harus dilakukan lebih awal adalah menentukan nilai Derajat Kebebasan (DK) atau *Degree of Freedom* (DF) sebagai acuan untuk menentukan nilai r_{Tabel} pada Tabel Distribusi Nilai r , adapun persamaan yang dapat digunakan adalah :

$$df = (N-2) / \alpha = 0,05 \text{ atau } df = (61-2) / \alpha = 0,05$$

$$df = 58 / \alpha = 0,05$$

Berdasar pada hasil perhitungan tersebut maka dapat dikatakan bahwa nilai r_{Tabel} dari penelitian ini berada pada angka **58** untuk nilai *Degree of Freedom* (DF), sementara untuk nilai signifikansi yang telah ditentukan yakni 0,05. Sehingga dari nilai yang tercantum pada sebaran di r_{Tabel} maka angka yang diperoleh adalah **0.254**

Nilai r_{Tabel} tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk diperbandingkan dengan nilai r_{Hitung} yang ditunjukkan pada Nilai *Pearson Corelation*, demikian pula untuk Nilai Signifikansi hasil analisis yang ditunjukkan pada nilai dan nilai *Sig. (2-Tailed)* juga diperbandingkan dengan Nilai *Sig* (α) = 0,05, sebagai dasar dalam menetapkan tingkat validitas masing-masing indikator.

Hasil Uji Validitas untuk setiap Indikator pada masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Uji Validitas Kuisioner Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Sig. (2-Tailed)	Sig α = 0,05	Pearson Corelation	r Tabel	Interpretasi
Literasi Keuangan Syariah	X1.1	.000	0.05	.760**	0.254	Valid
	X1.2	.000		.681**		Valid
	X1.3	.000		.782**		Valid
	X1.4	.000		.799**		Valid
	X1.5	.004		.513**		Valid
Inklusi Keuangan Syariah	X2.1	.000		.794**		Valid
	X2.2	.000		.834**		Valid
	X2.3	.000		.807**		Valid
	X2.4	.000		.846**		Valid
	X2.5	.000		.871**		Valid
Kinerja UMKM	Y1	.000		.784**		Valid
	Y2	.000		.853**		Valid
	Y3	.000		.792**		Valid
	Y4	.000		.835**		Valid
	Y5	.001		.429**		Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa semua indikator untuk masing-masing variabel dapat dinyatakan Valid dan telah memenuhi unsur yang dituangkan pada dasar pengambilan keputusan ketika nilai *Pearson Corelation* dan *Sig. (2-Tailed)* setiap indikator dapat dinyatakan **Valid**. Pembuktiannya dapat dilihat dari hasil perbandingan berikut :

- 1) Hasil analisis untuk nilai r_{Hitung} pada *Pearson Corelation* diperoleh nilai antara **0.429** hingga **0.871**, sementara nilai r_{Tabel} berada pada angka **0.254**. Jika diperbandingkan antara keduanya maka disimpulkan bahwa Nilai $r_{Hitung} > r_{Tabel}$ atau semua Indikator dinyatakan **Valid**.

- 2) Hasil analisis untuk *Sig. (2-Tailed)* diperoleh nilai antara **0.000** hingga **0,001**, artinya bahwa nilai tersebut masih lebih kecil dari Nilai Sig (α) = 0,05. Perbandingan tersebut mempertegas bahwa semua Indikator dinyatakan **Valid**.

b. Uji Realibilitas

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini menurut Sugiyono (2020) dapat diketahui dengan cara melihat :

- 3) Apabila Variabel yang diteliti mempunyai *Cronbach's Alpha* (α) $> r_{tabel}$ maka dapat dikatakan Reliabel
- 4) Sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha* (α) $< r_{tabel}$ maka dapat dikatakan tidak Reliabel.

Adapun hasil analisis untuk Uji Realibilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 5.3
Uji Realibilitas

Item-Total Statistics				
	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Interpretasi
Literasi Syariah	.758	.582	.789	Realibel
Inklusi Syariah	.718	.516	.829	Realibel
Kinerja UMKM	.746	.571	.780	Realibel

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk menilai Tingkat Realibilitas atau Tingkat Keandalan dari masing-masing variabel, maka hasil analisis pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* dari setiap variabel berada pada range antara **0,780-0,829**.

Hasil analisis tersebut jika diperbandingkan dengan nilai r_{tabel} yang diperoleh dari sebaran Distribusi nilai t yakni **0.245**, artinya bahwa Nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* semua Variabel lebih besar dari nilai r_{tabel} , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel **Realibel**.

Sementara untuk mengukur tingkat kehandalan dari masing-masing indikator dalam mengukur setiap variabel, maka sesuai standar yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020) dapat dinyatakan bahwa semua indikator variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* **0,780 dan 0.829** yang dapat dikategorikan tingkat Realibilitas indikator Kuat.

2. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual telah terdistribusi dengan normal. Uji Normalitas data yang diperoleh dari hasil analisis melalui *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* merupakan dasar rujukan apakah Analisis Regresi dapat dilakukan. Adapun dasar pengambilan keputusan pengujian ini adalah :

- c. Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data residual telah terdistribusi normal, artinya Uji Regresi dapat dilakukan.
- d. Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data residual tidak terdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap sebaran hasil isian kusioner

Hasil Uji Normalitas dengan model *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 5.4
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.92187543
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.086
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Analisis Uji Normalitas melalui model *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa sebaran dari variabel pengganggu atau residual dalam penelitian ini memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yakni **0,200**, artinya nilai ini jika merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk mengukur Nilai Normalitas dari penyebaran nilai Residual hasil isian kusioner dinyatakan **Lebih Besar** dari Nilai Signifikansi (α) = 0,05.

Sehingga pernyataan yang dapat diambil bahwa sebaran dari variabel pengganggu atau residual secara umum telah terdistribusi secara normal, dengan demikian maka Pelaksanaan Uji Regresi dapat dilakukan.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis untuk Uji Regresi Linear Berganda dalam rangka melihat pola hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.5
Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
	B				
(Constant)	3.403	1.958		1.738	.087
1 Literasi Syariah	.575	.134	.496	4.283	.000
Inklusi Syariah	.277	.098	.327	2.821	.007

a. Dependent Variable: Kinerja UMKM

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis untuk Uji Regresi Linear Berganda sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 5.4 maka pernyataan atau kesimpulan yang dapat diambil terhadap hasil analisis tersebut dijabarkan melalui persamaan berikut :

$$\text{Kinerja UMKM} = 3.403 + 0.575(X_1) + 0.277(X_2) + e$$

Uraian dari persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- Nilai Konstanta (a) yang diperoleh yakni sebesar **3.403**.
Sehingga jika tidak terdapat kenaikan pada nilai β atau diasumsikan 0 (Nol) untuk Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, maka dapat dikatakan bahwa Kinerja UMKM memiliki nilai sebesar **3.403**.
- Berdasarkan persamaan koefisien regresi yang diperoleh bahwa Literasi Keuangan Syariah yang ditunjukkan oleh nilai

β_1 adalah **0,575**, sehingga dapat diasumsikan jika Literasi Keuangan Syariah mengalami peningkatan 1 point, maka dapat dikatakan bahwa Kinerja UMKM akan mengalami peningkatan sebesar **0,575**, jika diasumsikan Inklusi Keuangan Syariah dianggap tidak mengalami kenaikan atau Konstant.

Nilai yang diperoleh pada β_1 juga dapat diasumsikan bahwa Literasi Keuangan Syariah memiliki Korelasi Positif terhadap Kinerja UMKM

- c. Persamaan koefisien regresi pada Tabel 5.4 juga memberikan gambaran bahwa Inklusi Keuangan yang ditunjukkan oleh nilai β_2 sebesar **0,277**, dapat diasumsikan jika Inklusi Keuangan mengalami peningkatan 1 point, maka dapat dikatakan bahwa Kinerja UMKM akan mengalami peningkatan sebesar **0,277** jika Literasi Keuangan Syariah dianggap tidak mengalami kenaikan atau Konstant.

Nilai yang diperoleh pada β_2 juga dapat diasumsikan bahwa Inklusi Keuangan Syariah memiliki Korelasi Positif terhadap Kinerja UMKM

4. Uji Hipotesis (Uji T dan Uji F)

c. Uji T (Uji Parsial)

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji Hipotesis (Uji T) secara Parsial dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara yakni :

3) Berdasarkan Nilai Signifikansi (0,05)

- a) Jika diperoleh Nilai Signifikansi $>$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya antara Variabel Independen tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen.
- b) Jika diperoleh Nilai Signifikansi $<$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya antara Variabel Independen memiliki hubungan signifikan terhadap Variabel Dependen

4) Memperbandingkan Nilai t_{Hitung} dengan Nilai t_{Tabel}

- a) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis $<$ Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.
- b) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis $>$ Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

Mendukung pengambilan keputusan pada uji hipotesis, maka salah satu alat ukur yang dijadikan perbandingan adalah nilai t_{Tabel} , sementara untuk dapat menentukan nilai t_{Tabel} , diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut :

$$t_{Tabel} = \alpha/2 ; n - k - 1$$

Dimana

α = Nilai Signifikansi 0,05

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel

Merujuk pada persamaan tersebut, maka dasar penentuan titik nilai t_{Tabel} pada Distribusi Nilai T dapat dilakukan model perhitungan berikut :

$$t_{Tabel} = 0,05/2 ; 61 - 3 - 1$$

$$t_{Tabel} = 0,025 ; 57$$

Hasil perhitungan ini dapat diartikan bahwa untuk menentukan nilai t_{Tabel} maka Nilai Signifikansi Uji Dua arah yang digunakan adalah 0,025. Sementara Titik Derajat Kebebasan (DK) atau *Degree of Freedom* (DF) berada pada angka 57. Sehingga nilai yang diperoleh berdasarkan Distribusi Nilai t adalah = **2.002**. Berdasar pada hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 5.4 maka keputusan yang dapat diambil untuk masing-masing Hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **H₁** = *Literasi Keuangan Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang*

Hasil Uji Hipotesis untuk pola hubungan pengaruh antara Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM, menunjukkan bahwa Nilai t_{Hitung} yang diperoleh adalah **4.283**, sementara untuk Nilai Signifikansinya yakni **0,000**. Sehingga berdasar pada hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a) Nilai t_{Hitung} dari Literasi Keuangan Syariah adalah **4.283** atau lebih besar dari nilai $t_{Tabel} = 2.002$. Hasil

Perbandingan tersebut dapat diartikan Literasi Keuangan Syariah memiliki hubungan pengaruh terhadap Kinerja UMKM.

- b) Sementara untuk mengukur nilai signifikansi dari hasil analisis Uji Regresi diperoleh gambaran bahwa nilai Sig untuk Literasi Keuangan adalah **0.000** atau lebih kecil dari Nilai Sig (α)=0.05. Maka keputusan dari hasil analisis ini adalah Literasi Keuangan pola hubungan yang signifikan terhadap Kinerja UMKM

Berdasar pada kedua hasil perbandingan tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Literasi Keuangan memiliki pola hubungan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain bahwa Hipotesis yang diajukan diterima.

- 2) **H₂** = *Inklusi Keuangan Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang*

Hasil analisis Uji Regresi Linear Berganda pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai t_{Hitung} yang diperoleh untuk Inklusi Keuangan Syariah adalah **2.821**, dimana nilai tersebut lebih besar dari Nilai t_{Tabel} yaitu = **2.002**. Jika merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk Uji

secara Parsial, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pola hubungan pengaruh antara Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM.

Sementara mengukur hubungan signifikansinya, maka diketahui bahwa nilai Sig untuk Inklusi Keuangan sesuai hasil analisis Linear Berganda adalah **0.001**, hal ini dapat diartikan bahwa Nilai Sig Inklusi Keuangan Syariah lebih kecil dari Nilai Sig (α)=0.05. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah Inklusi Keuangan Syariah memiliki pola hubungan yang signifikan terhadap Kinerja UMKM.

Merujuk pada kedua hasil perbandingan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Inklusi Keuangan Syariah memiliki pola hubungan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja UMKM di Desa Cemba Kabupaten Enrekang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Hipotesis yang diajukan diterima atau dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a diterima

d. Uji F (Uji Simultan)

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan ini adalah :

- 1) Membandingkan nilai F_{Hitung} dengan nilai F_{Tabel}
- c) Jika diperoleh Nilai $F_{Hitung} < F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa secara bersama-sama Variabel Independen

(X1,X2..) tidak memiliki pola hubungan pengaruh terhadap Variabel Dependen (Y)

- d) Jika diperoleh Nilai F_{Hitung} pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Variabel Independen (X1,X2..) memiliki pola hubungan pengaruh terhadap Variabel Dependen (Y)

2) Berdasarkan Nilai Signifikansi

- a) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $>$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa secara bersama-sama Variabel Independen (X1,X2..) tidak memiliki pola hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen (Y)
- b) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $<$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Variabel Independen (X1,X2..) memiliki pola hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen (Y)

Mendukung analisis untuk Uji Simultan, maka langkah awal yang harus dipenuhi yakni dengan menetapkan Nilai F_{Tabel} melalui penentuan *Degree of Freedom* (DF) yang dirumuskan melalui persamaan berikut :

$$Df = k; n-(k+1)$$

Dimana

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel Independen

Merujuk pada persamaan tersebut, maka titik *Degree of Freedom* (DF) sebagai dasar penentuan nilai F_{Tabel} pada Distribusi Nilai F dapat dilakukan model perhitungan berikut :

$$Df = 2 ; 61 - (2 + 1)$$

$$Df = 2 ; 58$$

Sehingga dari hasil perhitungan tersebut setelah dilakukan pencocokan pada Distribusi Tabel F, maka untuk nilai F_{Tabel} yang diperoleh adalah **2.396**

Perolehan terhadap Nilai F_{Tabel} tersebut selanjutnya akan diperbandingkan dengan Nilai F_{Hitung} yang diperoleh melalui hasil Uji ANNOVA, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.6
Analisis Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	295.236	2	147.618	38.634	.000^b
	Residual	221.616	58	3.821		
	Total	516.852	60			

a. Dependent Variable: Kinerja UMKM

b. Predictors: (Constant), Inklusi Syariah, Literasi Syariah

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Uji Anova yang ditunjukkan pada Tabel 5.5 memberikan gambaran bahwa nilai F_{Hitung} yang diperoleh yakni sebesar **35.608**, sementara untuk Nilai Signifikansi dari pengujian ini sebesar **0,000**. Maka sesuai dasar

pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan dapat dinyatakan bahwa :

a) Nilai F_{Hitung} dari hasil analisis Uji Anova adalah **35.608** atau dapat dinyatakan lebih besar dari nilai F_{Tabel} yakni **2.396**. Sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama Literasi dan Inklusi Keuangan memiliki pola hubungan pengaruh terhadap Kinerja UMKM.

b) Mengukur pola hubungan signifikansi dala Uji F atau Uji Simultan sesuai hasil analisis yang ditunjukkan pada Uji Anova, maka dapat dinyatakan bahwa Nilai Signifikansi yang diperoleh sebesar **0.000** atau lebih kecil dari Nilai Signifikansi **0.05**. Kesimpulan untuk perbandingan tersebut dapat dinyatakan bahwa Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah jika secara bersama-sama memiliki pola hubungan yang signifikan terhadap Kinerja UMKM.

Berdasar pada kedua hasil perbandingan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah jika secara bersama-sama memiliki pola hubungan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, atau dengan kata lain Hipotesis yang diajukan diterima.

5. Koefisien Determinasi atau Uji *R Square* (R^2)

Koefisien Determinasi atau Uji *R Square* (R^2) menurut Sugiyono (2020) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari variabel Independen (X) menjelaskan tentang Variabel Dependen (Y). Adapun hasil analisis untuk Uji Determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 5.7
Analisis Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.571	.556	1.95473

a. Predictors: (Constant), Inklusi Syariah, Literasi Syariah

b. Dependent Variable: Kinerja UMKM

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Uji Determinasi (*Uji R Square- R^2*) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.6, menunjukkan bahwa nilai *R Square* yang diperoleh adalah **0,571** atau jika hasil tersebut dipersentase maka nilainya adalah **57,1%**. Hasil Analisis Uji Determinasi ini dapat diartikan bahwa Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah mampu menjabarkan Kinerja UMKM sebesar **57,1%** sementara selebihnya dijabarkan oleh beberapa variabel lainnya yang tidak menjadi bagian dalam penelitian ini.

Tingkat Korelasi atau Hubungan Literasi dan Inklusi Keuangan yang didasarkan pada Nilai *R Square* yang diperoleh dari hasil analisis Uji Determinasi yakni 0, 571, maka menurut pandangan dari Darwin, Muhammad dkk (2021) Tingkat Korelasi

yang diperoleh berada pada rentang Nilai 0,51 s.d 0,99 atau dapat dinyatakan bahwa Tingkat Korelasi antara Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM dapat dikategorikan “Kuat”

C. Pembahasan.

1. *Literasi Keuangan Syariah Memiliki Pola Hubungan Pengaruh yang Signifikan Terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang.*

Tingkat Literasi merupakan sebuah bentuk keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap individu untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berupaya untuk memahami secara tepat dan efisien tentang perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan sehingga nantinya dapat memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan mereka.

Pengertian tersebut secara umum memiliki kesamaan jika tingkat literasi dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Berbasis Syariah, hal yang menjadi pembeda hanya pada tatanan bahwa pengelolaan keuangan dari seorang individu atau pelaku usaha lebih diorientasikan pada kemampuan yang berkaitan nilai halal dan haram, atau sesuatu yang dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam suatu tindakan keuangan.

Tingkat pemahaman ini pada dasarnya secara umum telah dimiliki oleh beberapa Pelaku UMKM Binaan Pemerintah Desa

Cemba, terlebih lagi masyarakat di desa ini dapat dikatakan seluruhnya beragama Islam, sehingga nilai-nilai Religiusitas memiliki nilai yang tinggi dimasyarakat, sehingga pemahaman terhadap nilai-nilai pada pengelolaan keuangan berbasis syariah dapat dipahami dengan baik.

Kondisi ini juga dikemukakan oleh Ahmad Fauzi (2020) bahwa salah satu faktor yang mendukung tingkat pemahaman masyarakat cukup baik terhadap Literasi Keuangan berbasis Syariah karena dipengaruhi oleh tingkat religiusitas yang dimiliki, artinya dalam pola berkehidupan masyarakat selalu menjunjung tinggi persoalan Halal dan Haram dari apa yang dihasilkan serta apa yang akan dikonsumsi.

Demikian pula dalam hal menjalankan usaha, dimana nilai-nilai kejujuran selalu diutamakan oleh mereka, terutama dari pelaku UMKM. Sebagaimana digambarkan dalam wawancara dengan salah satu pelaku usaha gorengan, bahwa mereka ketika melakukan pelayanan terhadap pembeli selalu berusaha untuk menyampaikan hal yang sebenarnya dengan tidak memberikan janji atau menjamin kualitas produk mereka jika memang memiliki kekurangan.

Sementara hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual barang campuran, juga diperoleh gambaran bahwa tingkat kepercayaan dari pelanggan menjadi hal paling utama, dan dalam

penetapan harga produk yang dijual mereka dengan tidak semena mena meningkatkan nilai keuntungan, walaupun peluang untuk melakukan hal tersebut cukup besar karena ditunjang oleh berbagai faktor seperti jarak dengan pasar terdekat cukup jauh, demikian pula dengan grosir yang adanya di ibukota kecamatan juga lumayan jauh, namun hal tersebut dianggap oleh mereka sebagai sebuah perbuatan yang tidak layak.

Dampak dari pola-pola syariah yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dirasakan justeru semakin menambah besar nilai penjualan mereka, olehnya itu menjadi searah dengan hasil analisis yang dilakukan bahwa Literasi Keuangan Syariah memiliki pola hubungan pengaruh yang signifikan dengan Kinerja UMKM jika ditinjau dari beberapa indikator yang digunakan seperti Pertumbuhan Usaha, Jangkauan Pemasaran, Penambahan Modal dan bahkan beberapa diantaranya telah berdampak pada jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Mifta Novianti Putri (2022), Edy Jumady (2022) dan Senda Yunita Leatemia (2023) bahwa dengan adanya kemampuan masyarakat terkait dengan Literasi Keuangan khususnya pada persoalan mendasar dalam Literasi Keuangan berbasis Syariah, dimana penekanannya diorientasikan pada perilaku yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan

terhadap kinerja usaha mereka, artinya dengan pengetahuan dasar tersebut tingkat kepercayaan pelanggan menjadi semakin tinggi dan tentunya berimbas pada pertumbuhan usaha.

Evriyenni (2022) juga menekankan bahwa pelaku UMKM agar dapat meningkatkan pertumbuhan usahanya maka hal paling utama untuk dilakukan yakni Sikap dan Perilaku Keuangan mereka, terlebih lagi jika sikap dan perilaku tersebut didasari oleh nilai-nilai syariah, maka pengaruhnya akan sangat besar terhadap beberapa indikator yang digunakan dalam Literasi Keuangan Syariah seperti Perluasan Pemasaran, Pertumbuhan Usaha dan Kepercayaan dari pelanggan.

Pelaku UMKM di Desa Cemba dalam hal pengelolaan usaha khususnya jika dihubungkan pemahaman terhadap nilai keuntungan yang diperoleh selama ini, selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga juga disisipkan sebahagian untuk menjadi penambah modal usaha, walaupun diakui oleh mereka bahwa keuntungan untuk mendukung pengelolaan usaha jumlah yang disisipkan masih sangat kecil, namun hal tersebut selalu diupayakan untuk harus dilakukan.

Upaya ini tentunya memperlihatkan gambaran bahwa tingkat pengetahuan dasar dari pelaku UMKM di Desa Cemba sudah cukup baik, yang artinya kemampuan tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Rivaldi Setiawan

(2023) bahwa dengan kemampuan literasi keuangan yang dimiliki oleh seorang pelaku UMKM akan dapat memberikan dorongan dalam mengambil keputusan terhadap kepentingan pengelolaan usaha.

2. *Inklusi Keuangan Syariah Memiliki Pola Hubungan Pengaruh yang Signifikan Terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang*

Menumbuhkan tingkat pemahaman masyarakat tentang Lembaga Keuangan khususnya yang berbasis Syariah tentunya diperlukan berbagai upaya yang signifikan dari para pemangku kebijakan pada Lembaga-Lembaga Keuangan Berbasis Syariah, sebab penggambaran terhadap tingkat keinginan masyarakat untuk dapat terlibat dalam penggunaan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Lembaga Keuangan banyak menarik minat dari para pelaku UMKM di Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

Pelaku UMKM melihat bahwa salah satu daya tarik dari produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan berbasis Syariah yakni adanya Pembagian secara adil terhadap produk investasi dalam rangka mendukung permodalan mereka. Olehnya itu dalam hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa Inklusi Keuangan Syariah memiliki pola hubungan pengaruh yang signifikansi terhadap Kinerja UMKM.

Inklusi keuangan yang digambarkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat secara umum telah mampu memiliki akses

pada pemanfaatan produk dan layanan dari lembaga keuangan formal, dan hal ini juga ditegaskan oleh Moh. Zaki Kurniawan (2022) bahwa Inklusi Keuangan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa masyarakat telah mampu memiliki akses terhadap produk dan layanan lembaga perbankan sesuai kebutuhan mereka.

Kondisi ini secara umum telah dapat dilakukan oleh hampir seluruh pelaku UMKM, namun permasalahan yang dihadapi yakni munculnya kekhawatiran terhadap persoalan Bunga yang oleh mereka dianggap tidak sesuai dengan kaidah dalam agama islam, sehingga oleh pelaku UMKM memiliki minat yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan produk-produk pada Lembaga Keuangan berbasis Syariah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku UMKM saat ini jika dihubungkan dengan penggunaan produk dan layanan dari Lembaga Keuangan Berbasis Syariah yakni terkait dengan Ketersediaan Produk dan Jasa Keuangan (*Availibility*), dimana diakui bahwa akses terhadap lembaga keuangan syariah tidak menjadi masalah akan tetapi untuk ketersediaan kantor layanan dari Lembaga Keuangan Syariah hanya tersedia di Ibukota Kecamatan.

Keyakinan masyarakat bahwa dengan pemanfaatan produk dan jasa layanan dari Lembaga Keuangan berbasis Syariah dapat

memberikan peluang besar bagi mereka untuk mengembangkan usaha yang dikelola, hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Agista Berliana (2023) bahwa keberadaan dari Perbankan Syariah di pelosok daerah memungkinkan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan lebih mudah untuk mendorong pertumbuhan usaha mereka, sebab salah satu produk yang sangat diminati oleh pelaku UMKM yakni pola pendekatan berbasis keadilan atau hubungan saling menguntungkan antara pihak lembaga keuangan syariah dengan pelaku UMKM.

Yadi Arodhiskara, dkk (2021) juga mengemukakan bahwa pola inklusi keuangan perlu menjadi perhatian dari pemangku kebijakan pada Lembaga Keuangan Syariah agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat terhindar dari pola Investasi Bodong, sebab saat sekarang tidak dapat dipungkiri telah banyak beredar penawaran pinjaman secara online dan hal ini dapat mengakibatkan masyarakat terjatuh pada pola investasi yang tidak jelas.

3. *Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah secara bersama-sama memiliki Pola Hubungan Pengaruh yang Signifikan Terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang*

Pemahaman terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan khususnya yang berbasis Syariah menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh semua masyarakat dan khususnya para pelaku UMKM, sebab dengan adanya kemampuan dan juga

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan akan membantu masyarakat dan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini juga ditegaskan oleh Mifta Novianti Putri (2022) bahwa Keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan usaha sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan kemampuan pelaku usaha dalam memahami Literasi dan Inklusi Keuangan.

Kinerja dari lembaga Keuangan khususnya yang memiliki orientasi pada sistem pengelolaan berbasis Syariah juga sangat dituntut mendukung kemampuan dari masyarakat khususnya para pelaku UMKM, sebab menurut Heriyati Chrisna (2023) bahwa baik secara parsial maupun simultan Literasi dan Inklusi Keuangan tidak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM jika tidak didukung oleh pengenalan secara utuh tentang produk dan jasa layanan Lembaga Keuangan Syariah tidak dsosialisasikan kepada masyarakat.

Sementara disisi lain Dian Wulandari (2023) menguraikan bahwa Inklusi Keuangan khususnya yang berbasis Syariah dapat membantu masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses dan sekaligus memperoleh bantuan pembiayaan baik itu memulai atau mengembangkan usaha yang dilakukan. Hanya saja menjadi berbeda jika masyarakat tidak mampu mendapatkan akses atau layanan dari Lembaga Keuangan berbasis Syariah, pernyataan ini juga dikemukakan oleh Senda Yunita Leatemia (2023) bahwa Nilai

Inklusi keuangan dapat menjadi rendah jika pihak lembaga keuangan berbasis Syariah tidak mampu memperhatikan unsur Ketersediaan Produk dan Jasa Keuangan (*Availability*) terutama penyediaan kantor-kantor cabang pebantu sehingga akses dari masyarakat menjadi lebih mudah.

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah secara simultan jika dapat dilakukan beriringan tentunya memiliki dampak sangat besar terhadap peningkatan kinerja UMKM, sebab melalui Inklusi Keuangan maka tingkat literasi keuangan dari masyarakat juga akan bertambah. Keyakinan atau tingkat kepercayaan masyarakat juga akan semakin tinggi terhadap penggunaan produk dan jasa layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan berbasis Syariah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Desa Cemba Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Literasi Keuangan Syariah memiliki pola hubungan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang, hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik kemampuan Literasi Keuangan Syariah dari Pelaku UMKM maka pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Usaha dan Pemasaran menjadi semakin meningkat sehingga modal usaha juga dapat bertambah.
2. Inklusi Keuangan Syariah memiliki pola hubungan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang, hal ini dimaksudkan bahwa kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap Produk dan Jasa Layanan dari Lembaga Keuangan Syariah maka peluang untuk pengembangan usaha menjadi semakin terbuka.
3. Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah jika secara bersama-sama memiliki pola hubungan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja UMKM Binaan Pemerintah Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik pola pengenalan produk dan jasa dari lembaga keuangan, maka tingkat literasi dari pelaku UMKM semakin meningkat sehingga dapat menjadi dasar untuk penggunaan produk dan jasa layanan pada Lembaga Keuangan Syariah untuk mendukung pengembangan usaha mereka.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan khususnya bagi Pemegang Kebijakan pada Lembaga Keuangan berbasis Syariah terkait dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah Desa diharapkan lebih proaktif untuk mendukung Peningkatan Kinerja dari para UMKM agar dapat berinteraksi dengan Lembaga Perbankan khususnya yang berbasis syariah dalam meningkatkan modal usahanya
2. Bahwa mendukung Kinerja UMKM khususnya di Desa Cemba dan secara umum, maka sosialisasi terhadap produk dan jasa layanan pada Lembaga Keuangan Syariah lebih dikenal, sehingga Literasi Keuangan Syariah masyarakat semakin meningkat
3. Mendukung Inklusi Keuangan dari Pelaku UMKM khususnya di Desa Cemba secara umum, maka diharap pada Lembaga Keuangan Syariah meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Desa, sehingga akses masyarakat untuk dapat menggunakan produk dan jasa layanan berbasis Syariah menjadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i, 2021. Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Ahmad Fauzi, Indri Murniawaty. 2020. Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah. *Economic Education Analysis Journal* Volume (9) Nomor (2) Tahun (2020) Hal : 473-486
- Agista Berliana, Amillia Atika Suri, 2023. Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa* Volume 3 Nomor 2 Juli 2023
- Alimusa, La Ode. 2020. Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Ansori, M. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2. Airlangga University Press
- Antara Kantor Berita Indonesia, 2023. OJK: Bank syariah bisa berkontribusi lebih besar untuk kembangkan UMKM.
<https://www.antaranews.com/berita/3843162/ojk-bank-syariah-bisa-berkontribusi-lebih-besar-untuk-kembangkan-umkm>
- Anggriani, Rita Melsa. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Bintan Center Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang : Univesitas Maritim Raja Ali Haji.
- Aprinthasari, M. N., & Widiyanto. 2020. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. *Business and Accounting Education Journal*, 1(1), 65–72
- Arfianty, Y Arodhiskara, I Rosadi, 2023. UMKM Menuju Well Literate, Penerbit NEM
- Ariyani, R. Misriah, and Muhammad Fauzan. 2020. Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UMKM Binaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Cirebon *Jurnal Cendekia* Jaya 2, No. 2 (2020)
- BPS. 2023. Data Kependudukan Indonesia Tahun 2022. Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Briliani, Tlirani Rahma. 2020. "Pengaruh Pendapatan, Pengalaman Keuangan Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga Di Kota Madiun." *Sekolah Tlinggi Ilmu Ekonomi*

Perbanas Surabaya, Journal of Business and Banking Volume 9
Number 2 November 2019 – April 2020

Darwin, Muhammad dkk. 2021. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif.
Bandung: CV Media Sains Indonesia

Dian Wulandari, 2023. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi
Keuangan Syariah Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada
UMKM Area Relokasi Alun-Alun Kejaksaan Cirebon). INKLUSIF :
Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam , Vol:8 No.2
Desember 2023

Edy Jumady, Ardiansyah Halim, Dewi Manja, Nurul Qaisah Amaliah. 2022.
Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja
Usaha Kecil di Kota Makassar. Jurnal Ecogen Vol. 5 No. 2 Tahun
2022. Hal : 284-293

Eka Indra Putra, 2023. Pengaruh Permodalan, Kualitas Produk, Dan
Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM, Dengan Pemberdayaan
UMKM Sebagai Variabel Intervening : Studi Kasus UMKM Di Kab.
Gowa. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin Makassar

Febrian, L. D., & Kristianti, I. 2020. Identifikasi Faktor Eksternal dan
Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM (Studi Kasus
pada UMKM di Kabupaten Magelang). Journal of Economic,
Management, Accounting and Technology, Vol 3 Nomor (1), Hal : 23-
35

Hasibuan, Malayu. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:
Penerbit Bumi Aksara

Heriyati Chrisna, Hernawaty, Hernawaty, 2023. Literasi Keuangan Syariah
Untuk Perkembangan UMKM. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah

Heru Kristanto dan Raden Hendry Gusaptono, 2021. Pengenalan Literasi
Keuangan Untuk Mengembangkan UMKM. LPPM UPN Veteran
Yogyakarta

Iin Khairunnisa and Dwi Ekasari Harmadji, 2022. Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah, (Global Eksekutif Teknologi, 2022).

Iwan Setiawan, 2021. Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. ISLAMIC BANKING: Jurnal
Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor
2 Edisi Februari 2021, Hal 263-278

Kusuma Ningtuti S. Soetiono, 2020. Literasi Dan Inklusi Keuangan
Indonesia. PT RajaGrafindo Persada

Machfud Ridha. 2023. Analisis Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Pada
Layanan Bsi Smart Agent Di Kota Banda Aceh. Skripsi : Program

Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mifta Novianti Putri, 2022. Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM.
Mikayah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2, August 2022,
Hal :. 81-87

Moh. Zaki Kurniawan dan Nindi Vaulia P. 2022. Buku Referensi Teori dan
Praktik Inklusi dan Literasi Keuangan. Eureka Media Aksara, Jawa
Tengah.

Muna Dahlia, 2020. Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah
Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah
(Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Program
Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nahla Zamharira, A.A Miftah, Ahmad Syahriza, 2021. Pengaruh Literasi
Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan
Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi
Kasus: Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Uin Sts Jambi)
Journal of Islamic Financial Management Vol. 01 No. 01(2021)
September 2021, 48

Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, 2022. "Layanan
Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan
Inklusi Keuangan Syariah," Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi
Syariah Volume 5, No. 1 Tahun 2022.

Nur Hidayah, 2021. Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di
Indonesia/Nur Hidayah Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers

OJK Institute, 2023. Webinar : Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan
Syariah, yang diselenggarakan pada Tanggal 16 Februari 2023
<https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1340/memperkuat-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023. *Roadmap* Pengembangan dan
Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020. OJK.go.id : Survei Nasional Literasi
dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Ketiga Tahun 2019. Dirilis pada
Tanggal 1 Desember 2020 melalui laman <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022. OJK.go.id : SP 82/DHMS/OJK/
XI/2022 tentang Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
(SNLIK) Tahun 2022. Dirilis pada Tanggal 22 November 2022
melalui laman
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022/SP%20-%20SURVEI>

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Keuangan Inklusi (SNKI)
- Puji Hastuti, dkk. 2020. Kewirausahaan Dan UMKM, Yayasan Kita Menulis, Medan. ISBN : 978-623-7645-41-2. Hal : xvi-226
- Rivaldi Setiawan, 2023. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Syiah Kuala. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Senda Yunita Leatemia, 2023. Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 4, No 4, Mei 2023, Hal 1152–1159
- Siti Alfia Ayu Rohmayanti, Andriani Samsuri, and Achmad Room Fitrianto, 2021. “Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur,” Muslim Heritage 6, Nomor. 2 (2021), Hal : 377–403.
- Sri Nurmayanti, 2021. Skripsi : Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan Bonena). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sujarweni, V. 2019. Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Yogyakarta :PT. Pustaka Baru
- Tulus Tambunan, 2021. UMKM di Indonesia : Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan. Jakarta : Prenada, 2021. ISBN : 978-602-383-091-6. Hal : 338
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Vernica Ayu Adelia. 2023. Strategi Dan Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Pembiayaan Produktif Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Menciptakan Stabilitas Keuangan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya. Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wilda Dinda Pratiwi, 2023. Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM dan dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2022. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta